



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamsno No. 2 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

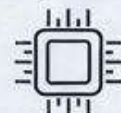


Telp. (0536) 3220517/ 3229663



Website : www.djslutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025”** ini dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa LKIP ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Palangka Raya, Februari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,



SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196902121989112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
1.4 Susunan Struktur Organisasi	4
1.5 Keadaan Personil dan Kepegawaian	5
1.6 Sistematika Penyajian LKIP	10
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	15
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	15
2.1.2 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	17
2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja	32
3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja	32
3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja	33
3.2 Evaluasi Kinerja	35
3.2.1 Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Nelayan (NTN)	35
3.2.2 Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	37
3.2.3 Indikator Kinerja Utama Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM)	38

3.2.4	Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	41	
3.2.5	Indikator Kinerja Utama Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	43	
3.2.6	Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap	46	
3.2.7	Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Budidaya	50	
3.2.8	Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP	53	
3.3	Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	55	
3.3.1	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran	55	
3.3.2	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran	56	
3.4	Analisis Dampak	58	
B.	Realisasi Anggaran	60	
3.5	Akuntabilitas Keuangan	60	
BAB IV			
PENUTUP			63
4.1	Capaian Kinerja IKU	63	
4.2	Permasalahan	65	
4.3	Upaya Tindak Lanjut	66	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Komposisi Pegawai PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan</i>	7
Tabel 1.2	<i>Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional</i>	8
Tabel 1.3	<i>Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan</i>	9
Tabel 2.1	<i>IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	21
Tabel 2.2	<i>Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	22
Tabel 2.3	<i>Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	30
Tabel 3.1	<i>Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	34
Tabel 3.2	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	35
Tabel 3.3	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2021-2025 pada Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	36
Tabel 3.4	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	37
Tabel 3.5	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2021-2025 pada Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	37
Tabel 3.6	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah.....</i>	39
Tabel 3.7	<i>Perbandingan Pergerakan Nilai KIM Kalteng dan Nasional dari Tahun 2021 - 2025 pada Indikator Kinerja Konsumsi Ikan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.....</i>	39
Tabel 3.8	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	41
Tabel 3.9	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	43
Tabel 3.10	<i>Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diperiksa di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	44

Tabel 3.11	<i>Capaian Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	44
Tabel 3.12	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	47
Tabel 3.13	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2021 - 2025 pada Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah.....</i>	47
Tabel 3.14	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	50
Tabel 3.15	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2021 – 2025 pada Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	51
Tabel 3.16	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah.....</i>	54
Tabel 3.17	<i>Perbandingan Indikator Pencapaian dari Target terhadap Realisasi Tahun 2025</i>	57
Tabel 3.18	<i>Kegiatan Yang Secara Individual Tidak Efektif Namun Secara Bersama-sama Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2025</i>	57
Tabel 3.19	<i>Kegiatan Yang Tidak Efektif dan Tidak Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2025.....</i>	58
Tabel 3.20	<i>Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.....</i>	62
Tabel 3.21	<i>Perkembangan Daya Serap Keuangan Per Triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025</i>	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	5
Gambar 1.2	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	6
Gambar 1.3	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Golongan</i>	7
Gambar 1.4	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jabatan</i>	8
Gambar 1.5	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Kualifikasi Pendidikan</i>	9
Gambar 1.6	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jenis Kelamin</i>	10
Gambar 3.1	<i>Grafik pergerakan KIM Kalteng dan KIM Nasional Tahun 2021-2025</i>	40
Gambar 3.2	<i>Grafik Trend / Kecenderungan Produksi Perikanan Budidaya di Kalteng sejak Tahun 2021-2025</i>	51
Gambar 3.3	<i>Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2025....</i>	56
Gambar 3.4	<i>Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025.....</i>	57
Gambar 3.5	<i>Surat sekretaris Dearah Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2025....</i>	61
Gambar 3.6	<i>Grafik Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2025 Belanja Per Triwulan.....</i>	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Perjanjian Kinerja Tahun 2025*
- Lampiran 2 : *Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025*
- Lampiran 3 : *Rencana Aksi Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025*
- Lampiran 4 : *Rencana Kinerja Tahunan 2026*
- Lampiran 5 : *Data Dukung Lainnya*

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governace*). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :

- a. keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi;
- b. keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran.

Arah dan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
- b. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
- c. Meningkatnya Kebutuhan Benih
- d. Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan
- e. Meningkatnya Konsumsi Ikan
- f. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
- g. Meningkatnya Pendapatan Nelayan
- h. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
- i. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku
- j. Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP
- k. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
- l. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 6 (enam) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2025, antara lain meliputi :

- a. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dengan Target 152.405,21 Ton/Tahun
- b. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan Target 145.481,98 Ton/Tahun
- c. Meningkatnya Kebutuhan Benih dengan Target 76.390 Ribu Ekor
- d. Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan dengan Target 35.697,36 Ton/Tahun
- e. Meningkatnya Konsumsi Ikan dengan Target 61,23 Kg/Kapita/Tahun
- f. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB dengan Target 3,50 %
- g. Meningkatnya Pendapatan Nelayan dengan Target 112,00 NTN/NTBi
- h. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir dengan Target 6 Lokasi
- i. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku dengan Target 90%
- j. Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP dengan Target 58
- k. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dengan Target B
- l. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat dengan Target 37 Naskah

B. Realisasi Anggaran

Untuk penilaian kinerja keuangan terkait dukungan terhadap kegiatan strategis diukur melalui realisasi keuangan. Di tahun 2025 realisasi keuangan terhadap program/ kegiatan terkait kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp. 37.735.055.391,- (91,26%) dari pagu anggaran Rp.48.504.293.043,-.

C. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja selama tahun 2025, yaitu meliputi :

- a. Lemahnya data perikanan karena proses pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan yang terintegrasi di pusat membuat data-data terkait produksi perikanan dan angka konsumsi ikan Kalimantan Tengah dapat diketahui angka tetapnya setelah melalui proses validasi per semester di tingkat pusat;
- b. Tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dimana kenaikan harga pakan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan konsumsi sehingga menyebabkan pembudidaya mengalami kerugian, akibatnya banyak pembudidaya yang mengurangi kegiatan usahanya;
- c. Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan;
- d. Terjadinya perubahan musim yang ekstrim sehingga mengakibatkan produksi budidaya ikan menjadi menurun karena banyak benih ikan yang mengalami kematian;
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- f. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
- g. Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan;
- h. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan;
- i. Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- j. Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional;
- l. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat; dan
- m. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

- n. Adanya peralihan dari AKI menuju KIM yang menyebabkan perbedaan nilai yang diakibatkan perbedaan indeks komponen perhitungan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- a. Sejak 2017, fokus perikanan tangkap adalah rehabilitasi/ pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan, yaitu dengan dimulainya Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedepannya, penyelesaian Rehabilitasi/ Pembangunan Lanjutan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai akan terus dikerjakan sampai dengan 2024, sambil tetap menyiapkan kelengkapan dokumen pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan lainnya;
- b. Mendorong percepatan operasional unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- c. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba;
- d. Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya;
- e. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR;
- f. Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah;
- g. Karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga, sehingga diperlukan sebuah koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral);
- h. Memperkuat payung hukum pengelolaan wilayah perairan (Perda dan sosialisasi Perda);
- i. Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat;
- j. Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada; dan
- k. Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah.
- l. Penerapan istilah KIM pada Tahun 2026 sehingga penilaian dapat akurat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* (sah) demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari pemerintahan yang baik tersebut adalah Akuntabilitas, yang dalam perspektif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada sebuah organisasi untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), mengingat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta

evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut adalah dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) pembangunan jangka menengah yang disusun secara periode lima tahunan. Pada tahun 2025, sebagai acuan dalam perencanaan strategis program dan kegiatan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut diantaranya memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai salah satu unit organisasi perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT);
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

1.4 Susunan Struktur Organisasi

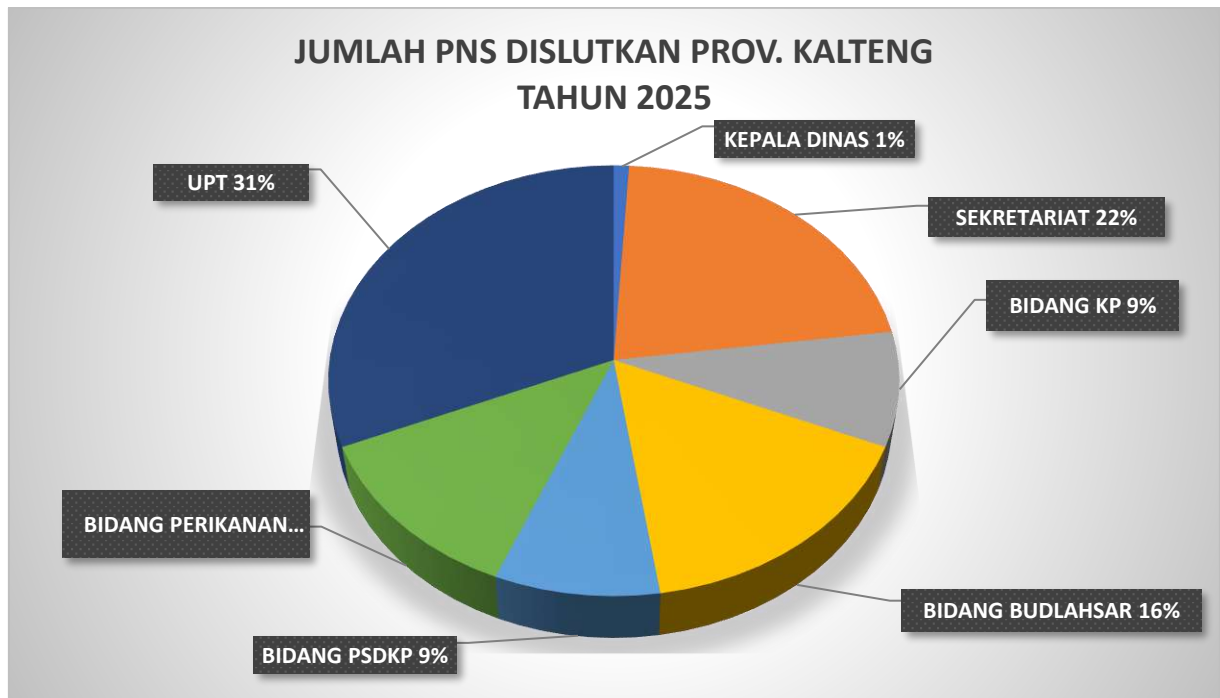
Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah BAB XVII Pasal 428, susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat; terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Kelautan dan Pesisir
- 4) Bidang Perikanan Tangkap
- 5) Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran
- 6) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Sejak tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat UPT yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah;
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah;
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah; dan
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah.

Seluruh Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas masuk dalam klasifikasi kelas A dan dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 1.2 *Diagram Komposisi PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah*

- b) Jika dilihat dari Gambar 1.2 di atas, jumlah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak terdapat di UPT sebanyak 31,5 % dari total jumlah pegawai Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Jumlah PNS yang ada di kantor dinas sebanyak 68,5 % sedangkan yang ada di UPT sebanyak 31,5 %.
- d) Jumlah PNS menurut golongan : Golongan IV sebanyak 11 Orang, Golongan III sebanyak 88 Orang, dan Golongan II sebanyak 6 Orang. Secara rinci, komposisi pegawai PNS dinas berdasarkan golongan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 *Komposisi Pegawai PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan*

No	Pangkat dan Golongan		Jumlah		Total	Ket
			L	P		
1	I/d	Juru Muda	0	0	0	
Jumlah Golongan I			0	0	0	
2	II/a	Pengatur Muda	0	0	0	
3	II/b	Pengatur Muda Tk. I	0	0	0	
4	II/c	Pengatur	1	0	1	
5	II/d	Pengatur Tk. I	5	0	5	
Jumlah Golongan II			6	0	6	
6	III/a	Penata Muda	17	20	37	
7	III/b	Penata muda Tk. I	3	3	6	
8	III/c	Penata	3	2	5	
9	III/d	Penata Tk. I	24	16	40	
Jumlah Golongan III			47	41	88	
10	IV/a	Pembina	4	4	8	
11	IV/b	Pembina Tk. I	0	2	2	
12	IV/c	Pembina Utama Muda	0	0	0	
13	IV/d	Pembina Utama Madya	0	1	1	
Jumlah Golongan IV			4	7	11	
Jumlah			57	48	105	

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2025

- e) Dilihat pada tabel di atas menurut golongannya PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak pada Golongan III yaitu sebesar 84 %, sedangkan jumlah terkecil pada Golongan II sebesar 6 %, dan kemudian Golongan IV sebesar 10 %. Komposisi ini disajikan pada Diagram berikut.



Gambar 1.3 *Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Golongan*

- f) Jumlah PNS Dislutkan Prov. Kalteng yang menduduki jabatan yaitu Eselon II sebanyak 1 Orang, jabatan Eselon III sebanyak 4 Orang, jabatan Eselon IV sebanyak 11 Orang, dan Pelaksana sebanyak 85 Orang yang terdiri dari 61 orang JFU (Pelaksana) dan 24 orang Fungsional (JFT).

Tabel 1.2 *Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional*

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II.A	1	0	1
2	Eselon III.A	2	2	4
3	Eselon III.B	3	1	4
4	Eselon IV.A	9	2	11
5	Pelaksana	34	27	61
6	Non-Struktural / Fungsional	12	12	24
Jumlah		61	44	105

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2025

- g) Dilihat pada tabel di atas berdasarkan jabatannya PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak pada jabatan Pelaksana yaitu sebesar 58%, sedangkan jumlah terkecil pada Eselon II.A dengan jabatan Kepala Dinas sebesar 1%, dan kemudian Golongan III.A atau Kepala Bidang sebesar 4% dan Kepala UPT sebesar 4%, dan Eselon IV A atau Kepala Seksi sebesar 10%, dan yang terakhir yaitu Non-Struktural/ Fungsional sebesar 23%. Komposisi ini secara rinci disajikan pada Diagram berikut.



Gambar 1.4 *Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jabatan*

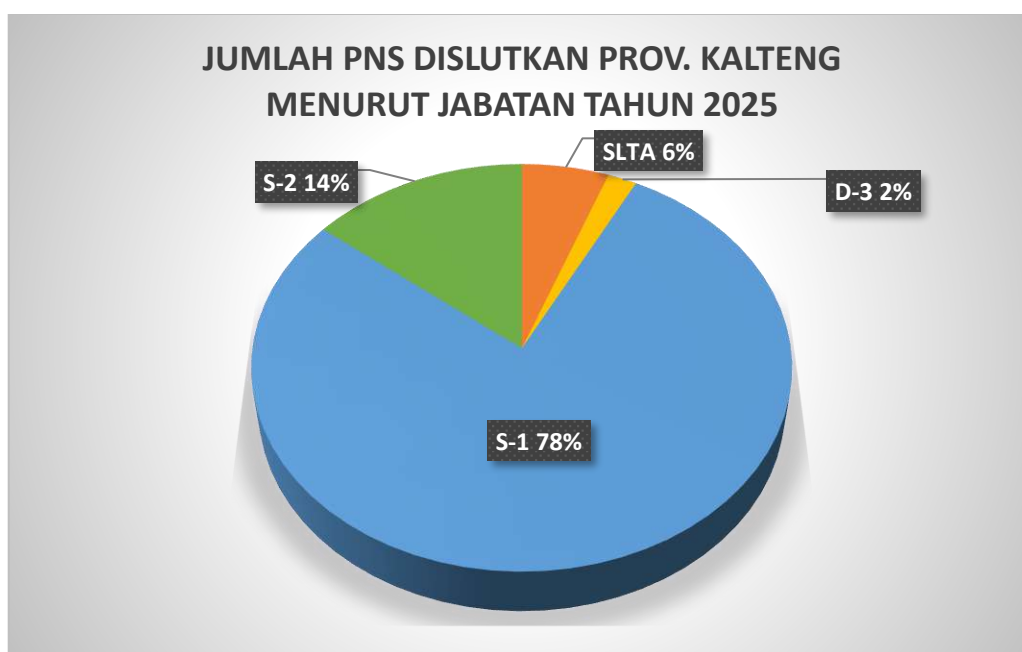
- h) Jumlah PNS menurut kualifikasi pendidikan yaitu S2 sebanyak 15 Orang, S1/D4 sebanyak 82 Orang, D3 sebanyak 2 Orang, dan SLTA/Sederajat sebanyak 6 Orang.

Tabel 1.3 *Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan*

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1	Sekolah Lanjutan Ttingkat Pertama (SLTP)	0	0	0
2	Sekolah Lanjutan Ttingkat Atas (SLTA)	6	0	6
3	Diploma Satu (D-1)	0	0	0
4	Diploma Tiga (D-3)	2	0	2
5	Diploma Empat (D-4) / Sarjana (S-1)	45	37	82
6	Pascasarjana (S-2)	7	8	15
Jumlah		60	45	105

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2025

- i) Menurut tingkat pendidikannya, PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak dengan tingkat pendidikan D-4 / S-1 mencapai 78 %, diikuti dengan tingkat pendidikan S-2 sebesar 14 % dan SLTA sebesar 6 %. Sedangkan yang berlatar belakang pendidikan D3 yang paling sedikit yaitu 2 %. Komposisi ini dapat dilihat pada Diagram berikut.



Gambar 1.5 *Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Kualifikasi Pendidikan*

- j) Menurut jenis kelamin, PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 57 orang atau 54 % berjenis kelamin laki-laki, sedangkan PNS perempuan sebanyak 48 orang atau 46 %. Komposisi ini dapat dilihat pada Diagram berikut.



Gambar 1.6 *Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jenis Kelamin*

1.6 Sistematika Penyajian LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2025. Capaian Kinerja Tahun 2025 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025 sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai berikut :

- a) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang; maksud dan tujuan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan struktur organisasi; dan keadaan personil dan kepegawain;
- c) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

- d) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- e) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja; dan
- f) **Lampiran**, pada lampiran disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Pada Tahun 2025 ini kegiatan-kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan acuan berdasarkan visi misi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan daerah Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2026 adalah : **“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”**.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.**
- Misi Kedua : Memperkuat Ketahanan Daerah dalam mengantisipasi Perubahan Global.**
- Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi.**
- Misi Keempat : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.**
- Misi Kelima : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.**

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan dihubungkan secara langsung kepada **Misi Kesatu Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang**

Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan yang dalam RPJMD dijelaskan bahwa terkait potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah berupa garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas, dan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan, maka sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan. Potensi inilah yang harus dimanfaatkan secara maksimal dan membutuhkan suatu terobosan strategi yang tepat dalam membangun kemampuan kreativitas dan meningkatkan kemampuan inovasi pelaku usaha perikanan agar mampu tumbuh dan bersaing.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, maka arah visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki konsistensi dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah yang Produktif, Berdaya Saing, Inovatif, Kolabratif dan Berorientasi pada penguatan Ekonomi Kerakyatan serta Pengelolaan Berkelanjutan”

Adapun Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi, dengan tujuan:

- Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan

2. Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:

- Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, dengan tujuan:

- Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD, terdapat 5 (lima) tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (indikator : produksi perikanan budidaya dalam ton/tahun),
 - b. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (indikator : produksi perikanan tangkap dalam ton/tahun);
 - c. Meningkatnya Kebutuhan Benih (indikator : jumlah kebutuhan benih dalam ribu ekor).
2. Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (indikator : jumlah volume produk olahan hasil perikanan dalam ton/tahun);
 - b. Meningkatnya Konsumsi Ikan (indikator : Tingkat Angka Konsumsi Ikan dalam kg/kapita/tahun).
3. Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Tujuan tersebut di capai dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (indikator : persentase kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB);
 - b. Meningkatnya Pendapatan Nelayan (indikator : Nilai Tukar NTN/NTBi).

4. Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (indikator : jumlah lokasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir dalam lokasi).
5. Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku (indikator : persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan dan UU yang berlaku dalam %);
 - b. Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP (indikator : jumlah Kelompok Masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP dalam kelompok).
6. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel (indikator : nilai SAKIP dalam huruf);
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi pelayanan Masyarakat (indikator : jumlah informasi publik yang disediakan oleh PPID dalam naskah).

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 6 (enam) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2025, antara lain meliputi :

- a. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator kinerja utama Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun), target 152.405,21;
- b. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, dengan indikator kinerja utama Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun), target 145.481,98;
- c. Meningkatnya Kebutuhan Benih, dengan indikator kinerja utama Jumlah Kebutuhan Benih (Ribu Ekor), target 76.390;
- d. Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan, dengan indikator kinerja utama Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun), target 35.697,36;
- e. Meningkatnya Konsumsi Ikan, dengan indikator kinerja utama Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun), target 61,23;

- f. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB, dengan indikator kinerja utama Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%), target 3,50;
- g. Meningkatnya Pendapatan Nelayan, dengan indikator kinerja utama Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi), target 112,00;
- h. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir, dengan indikator kinerja utama Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi), target 6;
- i. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku, dengan indikator kinerja utama Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku (%), target 90;
- j. Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP, dengan indikator kinerja utama Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP (Kelompok), target 58;
- k. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, dengan indikator kinerja utama Nilai SAKIP (Predikat), target B;
- l. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat, dengan indikator kinerja utama Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah), target 37.

2.1.2 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

A. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, dan laut; pembinaan kelembagaan pelaku usaha; pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi dan instalasi; pembinaan kelompok pembudidaya ikan,

- b. Peningkatan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap; optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan; mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan optimal; peningkatan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap,
- c. Penyediaan input produksi yang efisien (induk, benih, obat, pakan, peralatan); Pembinaan Unit Perbenihan Rakyat.
- d. Peningkatan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan; pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*; penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan,
- e. Promosi peningkatan konsumsi ikan,
- f. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap; peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Budidaya; peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Pengolahan Pemasaran Perikanan,
- g. Manajemen usaha penangkapan ikan melalui pendekatan *supply* (Sumber Daya Ikan) dan *demand* (Hasil Penangkapan Ikan),
- h. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan ruang laut dan pesisir secara berkelanjutan, rehabilitasi bakau (mangrove), dan terumbu karang; penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran Dinas dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut,
- i. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP,
- j. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan,
- k. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

B. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Arah Kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah adalah :

- a. Bantuan Benih Ikan dan Pakan Ikan, Fasilitasi dan sosialisasi sertifikasi lahan pembudidayaan ikan, Food Estate, pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan, seperti: Kluster Tambak Udang Vaname (*Shrimp Estate*), Penerapan teknologi adaptif dan efisien, seperti: Bioflok, Pengembangan pakan ikan mandiri yang murah dan berkualitas menggunakan bahan baku lokal, Pengembangan komoditas unggulan (ikan lokal) untuk ketahanan pangan, Mendorong kelompok pembudidaya ikan untuk membentuk kelembagaan yang berbadan hukum, Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- b. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait, Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan, Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan, Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan, Penguatan UPT perikanan tangkap;
- c. Modernisasi sarana produksi induk dan benih, Penguatan unit produksi di UPT, Peningkatan kualitas induk ikan, Sertifikasi Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- d. Fasilitasi kemitraan usaha, Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan, Fasilitasi akses pembiayaan, Penguatan pengadaan dan penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, Fasilitasi sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan dan pengolahan, Pembinaan mutu pada UPI;
- e. Safari Gemarikan, Pemberian paket Gemarikan (makanan berbahan baku ikan), Lomba masak berbahan baku ikan, Iklan layanan masyarakat dan pameran produk perikanan;
- f. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan;

- g. Pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan HAM Perikanan, Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
- h. Pelaksanaan pemberian izin oleh pemerintah provinsi, termasuk adanya pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Menteri, Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut antara pemangku kepentingan berupa sosialisasi, pendampingan, identifikasi pemanfaatan eksisting, dan koordinasi, Fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, Penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi, Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi;
- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab, Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir;
- j. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor, Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS, Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar;
- k. Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan akuntabilitas kinerja.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ukuran keberhasilan, tertuang pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 *IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun. Untuk tahun 2025, rencana kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 *Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	152.405,21
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	145.481,98

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (Ribu Ekor)	76.390
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	35.697,36
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	61,23
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	3,50
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	112,00
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	6
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	90
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP (Kelompok)	58
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	B
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah)	37

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disepakati. Penetapan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 diimplementasikan ke dalam 6 (enam) program, sebagai berikut :

(1) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan perairan umum daratan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:
 - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - 2) Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:
 - 1) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.
 - 2) Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
 - 1) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - 2) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Kelautan dan Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.566.430.500,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program menjadi Rp. 1.289.857.620,-.

(2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri dan ekspor, serta menyerap tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut;
 - 1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut.
 - 2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut.

- 3) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4) Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
- 1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp. 4.267.721.600,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp. 3.952.740.800,-

(3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasaran wilayah perairan bebas *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil:
 - 1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil.
 - 2) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.
 - 3) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil.
 - 4) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2023 sebesar Rp. 2.830.834.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program menjadi Rp. 879.461.000,-.

(4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan program ini adalah meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan, investasi, serta distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan serta peningkatan volume produk olahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar:
 - 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.
 - 2) Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing.
- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi:
 - 1) Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran. Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.354.020.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud tetap Rp. 975.987.000,-.

(5) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil:
 - 1) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
 - 2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi:
 - 1) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.

- c. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi:
 - 1) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai Dengan 10 GT.
- d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi:
 - 1) Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan.
 - 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.
 - 3) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp. 16.979.264.700,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp. 8.345.812.230,-.

(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan pembangunan secara terpadu, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pembangunan serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana aparatur dengan sasaran peningkatan pelayanan prima dan kinerja instansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penilaian barang Milik Daerah SKPD.
 - 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- 1) Pengadaan Mebel.
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Penyediaan Jasa Surat-Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- 2) Pemeliharaan Mebel.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Penanggung jawab program tersebut adalah Sekretariat dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp. 60.229.063.944,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp. 48.504.293.044,-, atau terdapat berkurang sebesar Rp. 11.724.770.901,-.

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah disepakati dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 *Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	152.405,21
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	145.481,98
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (Ribuan Ekor)	76.390
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	35.697,36
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	61,23
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	3,50
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	112,00
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	6
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	90

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (Kelompok)	58
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	B
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah)	37

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2025		KETERANGAN
		SEBELUM (Rp.)	SESUDAH (Rp.)	
1.	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.566.430.500	1.289.857.620	Perubahan Anggaran
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.267.721.600	3.952.740.800	Perubahan Anggaran
3.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.830.834.000	879.461.000	Perubahan Anggaran
4.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	16.979.264.700	8.345.812.230	Perubahan Anggaran
5.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	16.979.264.700	8.345.812.230	Perubahan Anggaran
6.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.230.793.144	33.060.434.394	Perubahan Anggaran
J U M L A H		60.229.063.944	48.504.293.044	

Sumber : DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Jumlah anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Tahun 2025 sebelum perubahan berjumlah Rp. 60.229.063.944,- dan setelah perubahan anggaran berjumlah Rp. 48.504.293.044,- atau terjadi pengurangan anggaran sebesar (Rp. 11.724.770.901,-) atau (19,47%).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Media pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2023 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2025 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	>100	Biru
2.	Baik	80-100	Hijau
3.	Cukup	50-79	Kuning
4.	Kurang	<49	Merah

3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcome*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 *Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

NO.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI TDH PK	KATEGORI TDH PUSAT
					NILAI	% TDH PK	% TDH PUSAT		
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	152.405,21	140.319,03	140.319,03*	92,06	100,00	Baik	Baik
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	145.481,98	145.481,98	159.305,74*	109,50	109,50	Sangat Baik	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (Ribu Ekor)	76.390	76.390	461.637,00*	604,31	604,31	Sangat Baik	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	35.697,36	35.697,36	35.693,87*	99,99	99,99	Baik	Baik
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	61,23	34,24	35,69*	58,28	104,23	Cukup	Sangat Baik
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	3,50	2	2,06*	58,85	103,00	Cukup	Sangat Baik
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	112,00	102	98,01*	87,50	96,09	Baik	Baik
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	6	6	10*	166,66	166,66	Sangat Baik	Sangat Baik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI TDH PK	KATEGORI TDH PUSAT
					NILAI	% TDH PK	% TDH PUSAT		
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	90	85	95,45*	106,05	112,29	Sangat Baik	Sangat Baik
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (Kelompok)	58	58	68*	117,24	117,24	Sangat Baik	Sangat Baik
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	100,00	100,00	Baik	Baik
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah)	37	37	79*	213,51	213,51	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka sementara

3.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala / masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka ditetapkan 12 (dua belas) sasaran, yang mengandung 12 (dua belas) indikator sasaran yang ingin dicapai di bidang kelautan dan perikanan pada Tahun 2025. Untuk mencapai 12 (dua belas) indikator sasaran tersebut, dilaksanakan melalui 6 (enam) program, dimana di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) kegiatan pokok dan 66 (enam puluh enam) sub-kegiatan.

Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera pada tabel di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 **Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**

3.2.1 Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Budidaya

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan budidaya, khususnya daging ikan untuk dikonsumsi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 3 (tiga) kegiatan pokok dan 8 (delapan) sub-kegiatan, yaitu penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut, penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	152.405,21	140.319,03	140.319,03*	92,06	100,00	Baik	Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sementara

Dilihat dari Tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2025 belum melampaui target PK yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah BAIK. Namun untuk target pusat mempunyai nilai yang seimbang, kategori pencapaian adalah BAIK. Produksi perikanan budidaya yang ditargetkan PK sebesar 152.405,21 ton mampu terealisasi 140.319,03 ton atau sebesar 92,06 % dan yang ditargetkan pusat sebesar 140.319,03 ton mampu terealisasi 140.319,03 ton atau sebesar 100,00 %.

Apabila capaian produksi perikanan budidaya tahun 2025 ini dibandingkan dengan capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2024 sebesar 136.176,72 ton dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan produksi sebesar 0,50%. Dapat diketahui bahwa walaupun produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 belum dapat mencapai target yang ditetapkan namun mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2021-2025 terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 3,84%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2021 – 2025 pada Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah*

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)					Kenaikan Rata-Rata Per Tahun (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Produksi Perikanan Budidaya	120.936,60	132.430,31	136.176,72	136.627,12	140.319,03	3,84

Namun, apabila dilakukan analisa kenaikan produksi setiap tahunnya, puncak kenaikan produksi ada di Tahun 2022, yaitu kenaikan sebesar 5,35% dibandingkan dari Tahun 2021. Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/penurunan produksi perikanan budidaya dari Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1 *Grafik Trend / Kecenderungan Produksi Perikanan Budidaya di Kalteng sejak Tahun 2021-2025*

Kondisi ini memerlukan analisa lebih lanjut untuk ditentukan permasalahannya, namun kondisi perikanan budidaya di Kalimantan Tengah yang masih menggunakan metode ekstensifikasi dan minim intensifikasi dengan penerapan teknologi terbaru diperkirakan menjadi salah satu alasan peningkatan produksi tidak berjalan naik secara linier.

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal pada indikator kinerja ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;

- b. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
- c. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan
- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya, antara lain :

- a. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui *pilot project* kelompok binaan pembudidaya handal salah satunya dengan pengembangan kawasan *Shrimp Estate* di Desa Sei Raja Kabupaten Sukamara;
- b. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui bantuan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya;
- c. Pemberian bantuan benih ikan kepada kelompok pembudidaya ikan dan lembaga keagamaan sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, antara lain benih ikan Betok dan ikan Jelawat; dan
- d. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

3.2.2 Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan tangkap. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 4 (empat) kegiatan pokok dan 7 (tujuh) sub-kegiatan.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	145.481,98	145.481,98	159.305,74*	109,50	109,50	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sangat sementara

Dilihat dari Tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target PK yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah SANGAT BAIK. Namun untuk capaian terhadap target pusat sudah melampaui, kategori pencapaian adalah SANGAT BAIK. Produksi perikanan tangkap yang ditargetkan PK sebesar 145.481,98 ton mampu terealisasi 159.305,74 ton atau sebesar 109,50 % dan yang ditargetkan pusat sebesar 145.481,98 ton mampu terealisasi 159.305,74 ton atau sebesar 109,50 %.

Apabila dibandingkan dengan capaian hasil tangkapan dari Tahun 2021-2025, maka terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi hasil tangkapan yakni sebesar 1,30% per tahun seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2021 - 2025 pada Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah*

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)					Kenaikan Rata-Rata Per Tahun (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Produksi Perikanan Tangkap	151.510,52	159.610,81	163.445,74	158.513,17	159.305,74	1,30

Pencapaian kinerja IKU ini di Tahun 2025 dinilai SANGAT BAIK. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi peningkatan produksi tangkap pada tahun 2025 menjadi 159.305,74 ton dari sebelumnya sebesar 158.513,17 ton atau meningkat sebesar 0,50%. Upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap serta penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT dalam rangka penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan dan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

Antara Sasaran RPJMD/Renstra Tahun 2025 dengan IKU Tahun 2025 haruslah saling mendukung dan sinergi sehingga dapat meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah. Pencapaian IKU ini pada Tahun 2025 memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat :

1. Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyerahkan pengelolaan ruang laut mulai 0 sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan provinsi. Sebagai akibat penerapan aturan ini, provinsi masih harus menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk pelimpahan kewenangan; personil, sarpras, dan wilayah kerja; salah satu diantaranya adalah keberadaan anggaran dan sumberdaya manusia yang difokuskan pada pelayanan kepada nelayan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Saat ini, kendala-kendala ini diupayakan agar dapat segera diatasi dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat nelayan.
2. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Satu Data atau dikenal dengan istilah *One Data*, yang mengharuskan setiap data yang dirilis

dan digunakan pemerintah adalah data resmi yang dikeluarkan oleh KKP. Sampai dengan saat penyusunan LKIP ini, data tahun 2025 dimaksud belum bisa dipublikasikan sehingga data yang digunakan adalah data berupa *angka sangat sementara* berdasarkan hasil validasi data statistik tingkat nasional pada semester 1 yang lalu dan estimasi keseluruhan dari data semester 2 yang terkumpul dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dan belum di validasi secara nasional.

Selain beberapa faktor yang bersifat umum terkait upaya pencapaian IKU, terdapat faktor penghambat antara lain :

- (a) Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap diperoleh dari data survei sampel desa perikanan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau tidak berfungsi selayaknya tempat pelelangan ikan. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. Dengan demikian, TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi keakuratan dan akuntabilitas data;
- (b) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, terutama armada penangkapan ikan di perairan laut sebagian besar masih berukuran < 5 GT sehingga trip penangkapan tidak terlalu lama dan luas jangkauan nelayan melaut tidak terlalu jauh. Selain itu, pelabuhan perikanan masih belum mampu menjadi sentra aktifitas nelayan, dikarenakan masih belum lengkapnya fasilitas kebutuhan nelayan pada areal pelabuhan;
- (c) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan rusaknya habitat ikan dan sumberdaya ikan semakin menurun karena eksploitasi berlebih terutama pada perairan umum daratan; dan
- (d) Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.

Berdasarkan analisa terhadap beberapa permasalahan di atas, terdapat beberapa rekomendasi solusi yang jangka pendek dapat dilaksanakan :

- a. Optimalisasi fungsi pelabuhan-pelabuhan perikanan di Kalteng. Pelabuhan perikanan memegang peranan penting pada sektor perikanan tangkap di laut. Ketersediaan kebutuhan nelayan dan kewajiban pengurusan dokumen kapal

dan berlayar pada pelabuhan perikanan akan memberikan kemudahan pelayanan terhadap nelayan. Jika hal ini dimaksimalkan, maka penerapan kebijakan pemerintah, data base penangkapan, dan pengelolaan perikanan tangkap laut dapat dilaksanakan melalui fungsi kepelabuhanan perikanan.

- b. Menggerakkan fungsi pengelolaan perijinan seirama dengan pengawasan, sehingga diharapkan masyarakat yang teridentifikasi kurang dalam perijinan dapat terlayani segera.
- c. Mengoptimalkan Petugas Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang ada di pelabuhan perikanan agar dapat melakukan pencatatan hasil tangkapan nelayan secara akurat dan tepat.
- d. Memberikan pelayanan konsultasi bagi nelayan melalui UPT yang ada di kabupaten secara online serta memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait kegiatan perikanan bagi pelaku usaha.
- e. Memberikan bantuan berupa jaminan perlindungan keselamatan bagi pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah melalui Kartu Asuransi Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) BERKAH.

SASARAN STRATEGIS 3 **Meningkatnya Kebutuhan Benih**

3.2.3 Indikator Kinerja Utama Jumlah Kebutuhan Benih

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah benih ikan yang dibutuhkan selama jangka waktu satu tahun di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 3 (tiga) kegiatan pokok dan 8 (delapan) sub-kegiatan.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (Ribu Ekor)	76.390	76.390	461.637*	604,31	604,31	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sangat sementara

Dilihat dari Tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2025 telah melampaui capaian yang telah ditetapkan atau mencapai kategori SANGAT BAIK.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2021-2025 terjadi kenaikan rata-rata jumlah benih perikanan budidaya sebesar 515,31%.

Tabel 3.7 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2021 - 2025 pada Indikator Kinerja Utama Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ribuan Ekor)					Kenaikan Rata-Rata Per Tahun (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Jumlah Kebutuhan Benih	68,812	70.517	72.824	75.862	461.637	515,31

Secara *trend* / kecenderungan produksi benih ikan di Kalimantan Tengah berdasarkan data di atas menunjukkan peningkatan walaupun masih sangat kecil. Peningkatan capaian kinerja pada indikator Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah ini dimulai sejak tahun 2013 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya sampai pada tahun 2020 sebesar 6,11%. Pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi penurunan benih dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 yang turut mempengaruhi aktivitas pembenihan yang dilakukan sehingga kebutuhan benih pun menurun. Namun sejak tahun 2022 hingga 2025 terjadi peningkatan kebutuhan benih. Apabila dianalisa hubungan produksi benih terhadap produksi perikanan budidaya, terdapat hubungan yang cukup erat, mengingat salah satu faktor penentu keberhasilan produksi perikanan budidaya adalah ketersediaan benih dari hasil produksi lokal Kalimantan Tengah. Jika kebutuhan benih di lokal Kalteng mencukupi, maka ketergantungan terhadap benih yang berasal dari luar Kalteng akan menurun, begitu pula logika sebaliknya.

UPT pemerintah dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada sekarang ini dalam memenuhi permintaan pasar dalam daerah secara tidak langsung mempengaruhi keberhasilan produksi perikanan budidaya secara umum. Hal inipun didukung dengan adanya ketersediaan benih yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan didukung dengan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya IKan yang Baik).

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal dalam pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya, yaitu :

- a. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
- b. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
- c. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan
- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Namun poin penting dan penekanan utama pada usaha rekomendasi terhadap kendala pencapaian kinerja ini adalah poin “c”, yaitu “Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi”.

Memperhatikan berbagai bahasan di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi benih perikanan budidaya, antara lain :

- a. Optimalisasi fungsi UPT perbenihan yang dimiliki pemerintah daerah (baik kabupaten/ kota), melalui peningkatan kompetensi SDM yang ada, peningkatan keberadaan sarpras pendukung, dan juga kemampuan alih teknologi melalui pembinaan kepada UPR yang berada di sekitar dan menjadi wilayah kerjanya;
- b. Dinas dapat melakukan kerjasama dengan provinsi tetangga/ daerah lainnya yang teridentifikasi sebagai penyuplai benih ke Kalteng, dalam rangka

menjamin kualitas dan kuantitas benih yang masuk ke Kalteng. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka menyaring benih yang masuk sembari menyiapkan kemampuan dalam daerah dalam menyediakan benih. Kerja sama ini telah dilakukan bersama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Kalimantan Selatan dan Balai Besar Perikanan Air Payau Jepara Jawa Tengah;

- c. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR;
- d. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui *pilot project* kelompok binaan pembudidaya handal;
- e. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya; dan
- f. Jalinan intensif kerjasama pemerintah daerah dan sektor permodalan untuk mampu memberikan pendanaan kredit lunak kepada pembudidaya potensial di Kalteng.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan

3.2.4 Indikator Kinerja Utama Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah produksi produk olahan perikanan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 2 (dua) kegiatan pokok dan 5 (lima) sub-kegiatan.

Adapun capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	35.697,36	35.697,36	35.693,87*	99,99	99,99	Baik	Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sangat sementara

Dilihat dari Tabel 3.8 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2025 belum melampaui target PK yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah BAIK. Namun untuk capaian terhadap target pusat ataupun target PK belum melampaui, kategori pencapaian adalah BAIK. Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan yang ditargetkan PK sebesar 35.697,36 ton mampu terealisasi 35.693,87 ton atau sebesar 99,99 % dan yang ditargetkan pusat sebesar 35.697,36 ton mampu terealisasi 35.693,87 ton atau sebesar 99,99 %. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap seharusnya dapat secara langsung meningkatkan produksi produk olahan. Hal ini terjadi mengingat sumber bahan baku produk olahan ikan di Kalteng sebagian besar berasal dari hasil tangkapan perairan laut dan umum, yaitu Ikan Tenggiri, Udang, dan Ikan Pipih; dan hasil budidaya, yaitu Bandeng dan Udang. Namun berdasarkan data yang tercatat, produksi produk olahan justru menunjukkan trend cenderung meningkat pada tahun 2021-2025 sebanyak 24.402,41 Ton pada tahun 2021 menjadi 35.693,87 Ton pada tahun 2025, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2021 - 2025 pada Indikator Kinerja Utama Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)					Kenaikan Rata-Rata Per Tahun (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	24.402,41	35.213,74	35.528,94	35.513,13	35.693,87	11,42

Jika memperhatikan selanjutnya di tahun 2021, data menunjukkan angka 24.402,41 ton yang berarti terjadi peningkatan yang cukup besar pada volume produk olahan hasil perikanan. Secara keseluruhan selama lima tahun kenaikan rata-rata jumlah volume produk olahan hasil perikanan cukup besar yaitu mencapai 11,42%.

Memperhatikan kondisi yang ada, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala dalam meningkatkan pencapaian sasaran indikator kinerja ini, antara lain :

- a. Ragam produk olahan hasil perikanan yang harus dikembangkan terus agar mampu bersaing dengan produk olahan pangan lainnya, yang diharapkan dapat dipasarkan ke luar daerah bahkan mampu di ekspor ke luar negeri;
- b. Produk hasil perikanan yang cenderung mudah rusak sehingga menyebabkan nilai ekonomisnya menurun dan isu penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap produk hasil perikanan menyebabkan daya beli masyarakat menurun terhadap produk olahan tertentu; dan
- c. Skala produksi olahan hasil perikanan di Kalimantan Tengah masih di skala industri rumah tangga sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.

Pencapaian kinerja **Sasaran Strategis-4** Tahun 2025 dinilai **Baik**, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran sehingga pada tahun 2025 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Pencapaian kinerja pada **Sasaran Strategis-4** tahun 2025 ini dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing. Selain itu, dilakukan pula upaya lainnya melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub-kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target tahun yang akan datang antara lain :

- a. Peningkatan produksi di sektor perikanan penangkapan dan budidaya untuk meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi segar maupun sebagai bahan baku pengolahan ikan;

- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung proses arus barang dan jasa agar dapat lancar dari kota ke desa maupun sebaliknya;
- c. Peningkatan Nilai Tambah Produk olahan perikanan di tingkat UMKM sehingga meningkatnya minat konsumen dalam mengkonsumsi ikan;
- d. Pemberian bantuan penguatan fasilitas permodalan ke UMKM sektor Kelautan dan Perikanan;
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang ada di UMKM; dan
- f. Peningkatan promosi, peluang investasi dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan.

Keberhasilan pencapaian pada **Sasaran Strategis-4** disebabkan oleh :

- (a) Peningkatan jumlah volume produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun budidaya; dan
- (b) Peningkatan jumlah UPI pengolah dan pemasar setiap tahunnya.

Yang menjadi tantangan dan kendala dalam pencapaian **Sasaran Strategis-4** adalah :

- (a) Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- (b) Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah; dan
- (c) Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Konsumsi Ikan

3.2.5 Indikator Kinerja Utama Tingkat Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Pada indikator kinerja utama tingkat angka konsumsi ikan (AKI) mengalami perubahan menjadi tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) pada tahun 2025 sehingga cara perhitungannya berbeda. Perubahan istilah dari Angka Konsumsi Ikan (AKI) menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) mulai tahun 2025 merupakan langkah pembaruan metadata statistik yang menggeser fokus dari sekadar angka kuantitatif nasional menuju pemantauan perilaku konsumsi riil di tingkat rumah tangga. Meski keduanya tetap menggunakan metrik yang sama, yaitu kg/kapita/tahun, istilah KIM lebih menekankan pada pendekatan sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor pendapatan, harga, dan preferensi masyarakat di lapangan. Dengan demikian, transisi ini bertujuan untuk

menghasilkan data yang lebih akurat dalam menggambarkan pola konsumsi ikan masyarakat secara nyata sebagai basis evaluasi kecukupan gizi nasional. Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 2 (dua) kegiatan pokok dan 5 (tiga) sub-kegiatan, dengan sasaran dan tujuan selain meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan juga bertujuan untuk mencapai tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM).

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Angka Konsumsi Ikan Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	61,23	34,24	35,69*	58,28	104,23	Cukup	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sangat sementara

Dilihat pada Tabel 3.10, pada tahun 2025 capaian sasaran peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat Kalteng adalah 35,69 kg/kapita/tahun atau mencapai 58,28% dari target PK yang ditetapkan. Hal ini di karenakan data realisasi sudah menggunakan perhitungan indikator KIM. Maka dari itu terdapat perbedaan nilai yang sangat besar sehingga mempengaruhi capaian kategori yaitu **CUKUP**. Sasaran Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) yang tercapai sebesar 35,69 kg/kapita/tahun jika di bandikan dengan target pusat yang perhitungannya sudah menggunakan KIM maka Capaian kinerja ini dinilai 104,23% dan mencapai kategori **SANGAT BAIK**. Angka capaian ini merupakan angka realisasi sementara dari target yang telah ditetapkan karena untuk perhitungan Konsumsi ikan masyarakat (KIM) ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah tahun berjalan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, pergerakan KIM Kalteng dan Nasional disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11 *Perbandingan Pergerakan Nilai Kosumsi Ikan Masyarakat (KIM) Kalteng dan Nasional dari Tahun 2021 - 2025 pada Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Kalimantan Tengah*

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Kg/Kapita/Tahun)					Kenaikan Rata-Rata Per Tahun (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kalimantan Tengah	35,84	36,37	34,74	33,73	35,69	-0,025
Nasional	25,33	25,88	25,07	25,31	26,08	0,76

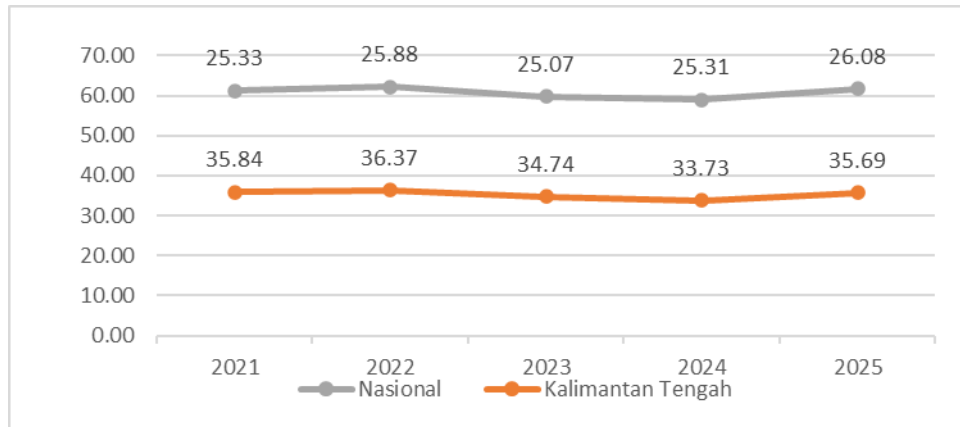
Secara sekilas, KIM Kalteng dari tahun 2021-2025 mengalami penurunan tipis sebesar -0,025%. Sedangkan secara nasional tahun 2021-2025 mengalami peningkatan AKI sebesar 0,76%. Perhitungan KIM ini dilaksanakan setiap tahun setelah tahun berjalan secara nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan menggunakan data hasil dari Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jadi untuk AKI tahun 2025 akan diperoleh angka tetapnya pada tahun 2026 setelah adanya perhitungan secara nasional. Sehingga pada tahun pelaporan ini masih menggunakan angka sementara yang merupakan angka estimasi dari capaian tahun sebelumnya yang dihitung saat kegiatan pra-validasi KIM pada bulan Desember 2025 lalu. Sedangkan untuk KIM Nasional masih merupakan angka target sebesar 26,08 karena masih belum dilakukan perhitungan KIM secara nasional.

Konsumsi Ikan Masyarakat merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Angka Konsumsi Ikan masyarakat adalah penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat. Konsumsi ikan rumah tangga merupakan jumlah konsumsi ikan segar, ikan dalam awetan, ikan dalam makanan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan. Konsumsi ikan diluar rumah tangga adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran, dan catering. Sedangkan konsumsi ikan tidak tercatat adalah jumlah konsumsi ikan dari rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren dan panti asuhan.

konsumsi ikan masyarakat dalam kilogram per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri untuk dikonsumsi masyarakat. KIM menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah, untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah, selain itu untuk mengetahui besarnya

kontribusi ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Program GEMARIKAN atau Gerakam Memasyarakatkan Makan Ikan merupakan salah satu program pemerintah untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Grafik pergerakan KIM Kalteng dan KIM Nasional dimaksud disajikan pada gambar berikut ini



Gambar 3.2 Grafik pergerakan KIM Kalteng dan KIM Nasional Tahun 2020-2025

Grafik tersebut menunjukkan tren perkembangan nilai antara Nasional dan Kalimantan Tengah selama periode 2021 hingga 2025 yang bergerak secara fluktuatif namun memiliki pola korelasi yang serupa. Nilai Nasional (garis abu-abu) mengawali periode di angka 25,33 dan ditutup dengan kenaikan menjadi 26,08 pada tahun 2025, yang mencerminkan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,76% per tahun meskipun sempat terkoreksi di tahun 2023. Di sisi lain, nilai Kalimantan Tengah (garis oranye) secara konsisten berada di level yang lebih tinggi dibandingkan Nasional, dimulai dari angka 35,84 dan berakhir di 35,69 pada tahun 2025 setelah pulih dari titik terendahnya di tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun kedua data sempat mengalami penurunan di pertengahan periode, keduanya menunjukkan tren pemulihan yang signifikan di tahun terakhir dengan jarak (gap) antar-nilai yang tetap terjaga secara stabil.

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

3.2.6 Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase kontribusi sektor perikanan Kalimantan Tengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah. Perhitungan PDRB ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Capaian kinerja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	3,50	2	2,06*	58,85	103,00	Cukup	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sementara

Dilihat dari Tabel 3.12 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2025 tidak melampaui target PK yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah CUKUP. Namun untuk capaian terhadap target pusat sudah melampaui, kategori pencapaian adalah SANGAT BAIK. Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan

Perikanan Terhadap PDRB yang ditargetkan PK sebesar 3,50 mampu terealisasi 2,06 atau sebesar 58,85 % dan yang ditargetkan pusat sebesar 2 mampu terealisasi 2,06 atau sebesar 103,00 %.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sektor perikanan membentuk nilai PDRB termasuk dalam kelompok unit produksi lapangan usaha sektor pertanian dimana kontribusinya disajikan dalam satu sektor lapangan usaha terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan. Perhitungan PDRB ini menggunakan pendekatan produksi, yaitu Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan tahun 2025 mampu memberikan kontribusi yang semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya sehingga produk yang dihasilkan di sektor perikanan Kalimantan Tengah memiliki nilai tambah yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan ini juga didukung oleh meningkatnya produksi perikanan tidak hanya dalam bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta peningkatan produksi olahan hasil perikanan. Dengan laju pertumbuhan PDRB ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor perikanan bertumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan produksi perikanan Kalimantan Tengah.

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Pendapatan Nelayan

3.2.7 Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Nelayan

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang nilainya didapatkan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dilakukan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	112,00	102,00	98,01*	87,50	96,09	Baik	Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sementara

Dilihat dari Tabel 3.13 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2025 tidak melampaui target PK ataupun target pusat yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah BAIK. Nilai Tukar Nelayan yang ditargetkan PK sebesar 112,00 mampu terealisasi 98,01 atau sebesar 87,50 % dan yang ditargetkan pusat sebesar 102,00 mampu terealisasi 98,01 atau sebesar 96,09%. Perbandingan tahun 2021-2025 terjadi kenaikan rata-rata per tahun Nilai Tukar Nelayan sebesar -0,06%. seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2021-2025 pada Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) di Provinsi Kalimantan Tengah*

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja					Kenaikan Rata-Rata Per Tahun (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kalimantan Tengah	100,64	97,36	96,49	98,21	98,01	-0,06

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan nelayan di pedesaan pada tahun dan bulan tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTN kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTN sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

Dilihat dari capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) di Kalimantan Tengah tahun 2025 nilainya belum melebihi 100 yang berarti bahwa pengeluaran nelayan di Kalimantan Tengah untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Hal ini dapat diasumsikan bahwa rata-rata nelayan di Kalimantan Tengah pada tahun 2025 belum mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Agar pendapatan usaha nelayan dapat lebih baik atau lebih tinggi daripada pengeluarannya maka perlu juga didukung kegiatan peningkatan sarana penangkapan nelayan perairan laut dan perairan umum daratan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, serta peningkatan keterampilan usaha nelayan.

SASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

3.2.8 Indikator Kinerja Utama Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah lokasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sasaran program ini adalah peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan perairan umum daratan, yang bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan.

Adapun capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang laut dan Pesisir di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	6	6	10*	166,66	166,66	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.15 di atas, pencapaian dari target lokasi yang dicadangkan sebagai kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir dapat

terrealisasi sebanyak 10 lokasi atau setara 166,66% dari target PK maupun pusat, sehingga termasuk kategori SANGAT BAIK.

Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP3K) Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 sebagai acuan untuk mengelola wilayah pesisir dan laut Kalimantan Tengah. Adanya peraturan daerah yang menjadi landasan hukum untuk mengelola wilayah pesisir dan laut ini penting mengingat sangat berlimpahnya sumberdaya alam di wilayah laut dan pesisir Kalimantan Tengah dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta berbagai konflik antar pihak-pihak penerima manfaat. Untuk itulah diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak yang berwenang agar sumberdaya alam pesisir dan laut Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat Kalimantan Tengah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan pengelolaan kawasan dimaksud secara baik, terdapat rekomendasi yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- a. Menyiapkan sarpras pendukung pengelolaan kawasan, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan pemanfaatan kawasan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan perairan;
- b. Menyusun dan mengajukan telaahan maupun kajian pengelolaan kawasan berbasis lestari (*sustainability*) sebagai landasan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dimaksud.

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan Undang-Undang yang Berlaku

3.2.9 Indikator Kinerja Utama Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan dan peraturan perundang yang berlaku. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Terdapat 1 (satu) kegiatan pokok dan 7 (tujuh) sub-kegiatan pada program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Capaian kinerja IKU pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	90	85	95,45*	106,05	112,29	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sementara

Dilihat dari Tabel 3.16 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target PK ataupun target pusat yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah SANGAT BAIK. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku yang ditargetkan PK sebesar 90 mampu terealisasi 95,45 atau sebesar 106,05 % dan yang ditargetkan pusat sebesar 85 mampu terealisasi 95,45 atau sebesar 112,29 %.

Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku dilihat dari aspek pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil telah terpenuhi pemanfaatannya seluas 61.362,24 Ha atau telah mencapai keseluruhan target. Apabila dilihat dari aspek penangkapan sampai dengan 12 mil maka dapat dilihat dari hasil laporan operasi pengawasan di perairan selama tahun 2025 telah diperiksa 44 pelaku usaha kelautan dan perikanan dan terdapat 2 pelaku usaha kelautan perikanan yang kurang patuh yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17 *Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diperiksa di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

No.	Komponan Pelaku Usaha KP (n)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang diperiksa (si)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Patuh (ci)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Kurang Patuh
1	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	16	15	1
2	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	13	12	1
3	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	13	13	0

No.	Komponan Pelaku Usaha KP (n)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang diperiksa (si)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Patuh (ci)	Jumlah Sampel Pelaku Usaha KP yang Kurang Patuh
4	Pelaku Usaha Pengumpul Ikan Hidup	2	2	0
Total		44	42	2

Berdasarkan data pada tabel tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi di sektor Kelautan dan Perikanan, di mana dari total 44 sampel pelaku usaha yang diperiksa, terdapat 42 pelaku usaha yang patuh dan hanya 2 pelaku usaha yang dinilai kurang patuh. Rinciannya mencakup pelaku usaha Perikanan Tangkap (15 patuh, 1 kurang patuh), Perikanan Budidaya (12 patuh, 1 kurang patuh), serta sektor Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengumpul Ikan Hidup yang keduanya mencapai tingkat kepatuhan 100% dengan masing-masing 13 dan 2 sampel yang semuanya dinyatakan patuh.

Capaian persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18 *Capaian Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

No.	Uraian	Jumlah Sampel	Capaian	Keterangan Sumber Data
1	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	15	95,45 %	Data diperoleh dari Dislutkan Prov. Kalteng
2	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	12		Data diperoleh dari Dislutkan Prov. Kalteng
3	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	13		Data diperoleh dari Dislutkan Prov. Kalteng
4.	Pelaku Usaha Pengumpul Ikan Hidup	2		Data diperoleh dari Dislutkan Prov. Kalteng

Tabel ini menampilkan rekapitulasi capaian kinerja pelaku usaha perikanan yang datanya bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah. Data tersebut merinci komposisi sampel yang berkontribusi pada penilaian, yaitu terdiri dari 15 Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, 12 Pelaku Usaha Perikanan Budidaya, 13 Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan, dan 2 Pelaku Usaha Pengumpul Ikan Hidup. Secara keseluruhan,

akumulasi dari kinerja keempat komponen pelaku usaha ini menghasilkan angka capaian akhir sebesar 95,45%.

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan ini dilakukan pembinaan lebih lanjut dengan pendampingan dan pemberian rekomendasi dalam melengkapi standar usahanya.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kepemilikan izin usaha perikanan tangkap, antara lain :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang berlaku;
- b. Aparat pelaksana atau penegak hukum yang dapat mengayomi dan mengarahkan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku;
- c. Kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk menaati peraturan yang berlaku;
- d. Sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses perizinan tidak memakan waktu panjang; dan
- e. Dana yang memadai sesuai aturan yang berlaku dan tidak dirasa terlalu berat bagi pelaku usaha.

Dalam mewujudkan hal ini agar dapat berkelanjutan dan meningkat pada tahun berikutnya maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendataan kapal nelayan;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pendampingan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha perikanan maupun yang belum.

Dalam rangka optimalisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka membantu kepatuhan pelaku usaha perikanan maupun masyarakat dalam perizinan bidang kelautan dan perikanan maka Dinas Kelautan dan Perikanan mengembangkan aplikasi Geoportal Laut Berkah yang dapat diakses melalui website <https://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id/>. Aplikasi ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan akses kepada stakeholder dalam proses Perizinan Lokasi Perairan dan perizinan pengelolaan perairan yang berlangsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan secara elektronik.

- b. Memberikan kepastian proses yang dapat terpantau secara kekinian / realtime oleh para stakeholder, sebagaimana SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- c. Menyediakan pustaka digital terhadap berbagai proses perizinan dan dokumen terkait, yang bisa diakses dengan lebih cepat tanpa terkendala aspek geografis.
- d. Memudahkan bagi investor yang berminat untuk mendapatkan informasi terkait potensi investasi di perairan Provinsi Kalimantan Tengah.

Menyediakan peta online yang memiliki informasi terkait potensi investasi yang dapat diakses oleh stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP

3.2.10 Indikator Kinerja Utama Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Berperan Dalam Pengawasan SDKP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan IKU pada Sasaran Strategis-10 ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Capaian kinerja IKU ini pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (Kelompok)	58	58	68*	117,24	117,24	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sementara

Dilihat dari Tabel 3.18 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2025 sudah melampaui target PK ataupun target pusat yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah SANGAT BAIK. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku yang ditargetkan PK sebesar 58 mampu terealisasi 68 atau sebesar 117,24 % dan yang ditargetkan pusat sebesar 58 mampu terealisasi 68 atau sebesar 117,24 %.

POKMASWAS berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Pengawasan, pemantauan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan ilegal yang berupa : penyetruman ikan, peracunan ikan (potas), penggunaan alat tangkap terlarang, budidaya/keramba yang terlalu banyak, dan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem perairan/danau. Untuk itu, melalui bantuan yang diberikan ini diharapkan agar peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat terjalin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan ilegal.

Salah satu upaya mengurangi pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS). Sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan menurunnya tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk ekosistem danau dan perairan umum lainnya),
 - b. Menguatnya kelembagaan pengawasan di daerah,
 - c. Terciptanya pengawasan mandiri oleh POKMASWAS di daerah,
 - d. Terjalannya koordinasi pengawasan secara terpadu (PPNS Perikanan, Polisi, TNI-AL, dan Masyarakat), dan
 - e. Lestarnya ekosistem perairan (danau) dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
- b. Pelaksanaan kegiatan SISWASMAS melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Berdasarkan data pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah POKMASWAS yang telah

terbentuk dan aktif sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Faktor pendorong terjadinya kasus pelanggaran tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, disebabkan oleh :

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat; dan
- b. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Pencapaian kinerja IKU ini dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan : kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil, serta penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Oleh karena itu untuk ke depan dalam rangka pencapaian kinerja tahun mendatang maka ditempuh strategi yang mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain :

- a. Memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral) karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga;
- b. Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda);
- c. Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat;
- d. Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada; dan
- e. Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.

SASARAN STRATEGIS 11 **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel**

3.2.11 Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perolehan nilai SAKIP hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari 41 sub-kegiatan pada 8 (delapan) kegiatan pokok program tersebut,

yang mendukung IKU ini adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang didukung kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi kepegawaian perangkat daerah.

Capaian kinerja IKU pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	100,00	100,00	Baik	Baik

Berdasarkan tabel 3.21 di atas, pencapaian dari target Nilai SAKIP senilai B atau setara 100,00% dari target PK maupun pusat, sehingga termasuk kategori BAIK.

Berdasarkan <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/tingkat-penilaian-akip-rating> diketahui bahwa predikat B memiliki rentang nilai >60-70 sehingga capaian IKU ini telah melebihi ambang atas rentang nilai di angka 70 atau tercapai sebesar 100,00%.

LKIP adalah instrumen pengukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah yang dilengkapi dengan laporan keuangan dan data statistik pendukung terkait. LKIP juga digunakan sebagai pedoman instansi pemerintah dalam menilai kinerja karyawan, penggunaan anggaran, investasi, dan hasil kerjanya sehingga LKIP dapat digunakan sebagai instrumen untuk memotivasi peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan LKIP sebagai dasar informasi yang akurat dan terukur.

Sebagai instrumen pengukuran bagi instansi pemerintah, LKIP memiliki manfaat yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja, dengan menciptakan kejelasan dalam mengukur kinerja instansi pemerintah sehingga dapat mengevaluasi kinerja dan menerima umpan balik yang jelas dan terukur sehingga instansi pemerintah dapat membuat rencana aksi yang dapat meningkatkan kualitas kerjanya.
2. Meningkatkan Transparansi, dengan menyediakan informasi untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dan transparansi instansi pemerintah.

3. Meningkatkan Akuntabilitas, dengan adanya kerangka pengukuran yang jelas maka instansi pemerintah akan lebih akuntabel dengan keputusan dan kinerja yang dihasilkannya sehingga diharapkan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi standar yang tinggi untuk tanggung jawab dan akuntabilitas.

SASARAN STRATEGIS 12

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat

3.2.12 Indikator Kinerja Utama Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah informasi yang disediakan oleh PPID. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Capaian kinerja IKU pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TARGET PUSAT 2025	REALISASI			KATEGORI THD PK	KATEGORI THD PUSAT
					NILAI	% THD PK	% THD PUSAT		
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah)	37	37	79*	213,51	213,51	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sementara

Dilihat dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu target PK maupun pusat sebesar 37 naskah dan tercapai sebanyak 79 naskah atau 213,51%.

Pelayanan masyarakat merupakan segala jenis layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun badan publik kepada masyarakat. Yang berarti bahwa pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengembangkan inovasi pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Hal ini sesuai

dengan yang diamatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan penyediaan informasi melalui *website* PPID dengan alamat www.ppid.go.id, website Dinas www.dislutkan.kalteng.go.id selain itu Dinas juga memiliki media sosial Facebook [Dinas Kelautan Perikanan Kalteng](#) dan Instagram dengan nama [Dislutkan Kalteng](#), serta dapat datang langsung atau melalui telepon/faksimile dengan nomor: (0536) 3229663 / 3220517 dan melalui e-mail dengan alamat: dislutkan@kalteng.go.id.

Selain itu, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengembangkan Aplikasi PPID Dislutkan Kalteng *Mobile* berbasis *android*. Dalam penyediaan informasi kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan Aplikasi Buku Pintar Dislutkan Kalteng. Semua aplikasi ini dapat diakses melalui website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah: www.dislutkan.kalteng.go.id.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh prestasi 5 (lima) kali berturut-turut sebagai Peringkat 1 Informatif Kategori Badan Publik Perangkat Daerah Pemprov. Kalteng dalam Keterbukaan

Informasi Publik sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam penyebaran informasi terkini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pun berperan sebagai kontributor Multi Media Center (MMC) Kalteng yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah. Semua berita terkait sektor kelautan dan perikanan yang disediakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dipublikasikan pada website MMC Kalteng yaitu di <https://mmc.kalteng.go.id/>.

Hasil penilaian terhadap 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 12 (dua belas) sasaran strategis selama tahun 2025 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah optimal. Hal ini menggambarkan bahwa setiap program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian IKU dikarenakan adanya sinergitas antara pemangku kepentingan, pelaksana maupun masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja seperti tersebut diatas, melainkan juga menyajikan informasi relevan lainnya agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja sesuai dengan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, dimana sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor riil yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan yang didukung oleh tingkat produksi dan sarana/prasarana serta kualitas sumber daya manusia yang memadai. Berikut Matrik *Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan terhadap Realisasi Tahun 2025*

Tabel 3.23 *Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator terhadap Realisasi Tahun 2025*

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET & REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV		Fisik
							REALISASI	%	
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				41,349,144,126.72	37,735,055,391	91.26	99.94
Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	27,080,577,804.22	24,127,851,183	89.10	100.00
Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat		Jumlah Informasi Publik yang disediakan oleh PPID (Naskah)	37	79				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1,369,021,780.00	1,315,748,137	96.11	100.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	335,521,530.00	335,100,391	99.87	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	23,149,000.00	22,828,780	98.62	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,545,000.00	8,220,000	96.20	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,206,250.00	8,130,700	99.08	100.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET & REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV		Fisik
							REALISASI	%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,216,000.00	7,985,000	97.19	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	496,000,000.00	489,396,912	98.67	100.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	489,384,000.00	444,086,354	90.74	100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tahun layanan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	16,465,823,721.30	14,819,571,912	90.00	100.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	15,737,083,721.30	14,299,087,960	90.86	100.00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	641,500,000.00	455,545,620	71.01	100.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30,240,000.00	12,680,000	41.93	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000.00	16,125,000	80.63	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	37,000,000.00	36,133,332	97.66	100.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	172,767,000.00	119,208,570	69.00	100.00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17,000,000.00	16,050,000	94.41	100.00
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000.00	8,894,090	14.82	100.00
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25,000,000.00	24,520,000	98.08	100.00
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	70,767,000.00	69,744,480	98.56	100.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	425,495,000.00	420,587,360	98.85	100.00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	80,000,000.00	79,809,000	99.76	100.00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	126,000,000.00	124,819,500	99.06	100.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET & REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV		Fisik
							REALISASI	%	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	31,495,000.00	31,495,000	100.00	100.00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	52,000,000.00	51,613,860	99.26	100.00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	36,000,000.00	35,350,000	98.19	100.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	100,000,000.00	97,500,000	97.50	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	2,618,340,795.92	2,330,382,470	89.00	100.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22,707,600.00	21,960,300	96.71	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24,000,000.00	17,885,200	74.52	100.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35,300,000.00	33,765,000	95.65	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,395,383,195.92	1,299,983,300	93.16	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	320,000,000.00	265,825,219	83.07	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00	324,370,000	81.09	100.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	127,600,000.00	74,423,370	58.33	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	223,350,000.00	222,170,081	99.47	100.00
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah paket Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Paket	2 Paket	70,000,000.00	70,000,000	100.00	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Paket	2 Paket	37,500,000.00	22,950,000	61.20	100.00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,500,000.00	7,000,000	93.33	100.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30,000,000.00	15,950,000	53.17	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2,229,598,500.00	1,494,527,920	67.03	100.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET & REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV		Fisik
							REALISASI	%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6,700,000.00	6,700,000	100.00	100.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	815,450,000.00	377,824,725	46.33	100.00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	99,900,000	99.90	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1,307,448,500.00	1,010,103,195	77.26	100.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3,762,031,007.00	3,604,874,814	95.82	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Kendaraan	7 Kendaraan	360,000,000.00	282,184,911	78.38	100.00
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Mebel	10 Mebel	26,985,336.00	20,604,500	76.35	100.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Peralatan	10 Peralatan	23,000,000.00	8,746,000	38.03	100.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	3,352,045,671.00	3,293,339,403	98.25	100.00
Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	6 Lokasi	10 Lokasi	1,189,857,619.50	1,030,796,379	86.63	99.24
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Dokumen Program Strategis Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	879,993,369.50	746,860,527	84.87	100.00
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2 Kawasan	2 Kawasan	56,095,000.00	53,117,000	94.69	100.00
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Wilayah	2 Wilayah	82,976,000.00	34,062,878	41.05	100.00
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5 Lokasi	5 Lokasi	177,446,000.00	137,094,533	77.26	100.00
		Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3	Jumlah Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3/K/	5 Dokumen	5 Dokumen	257,148,500.00	243,548,340	94.71	100.00
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	2 Dokumen	2 Dokumen	45,075,369.50	39,247,000	87.07	100.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET & REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV		Fisik
							REALISASI	%	
		Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Jumlah dokumen Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	2 dokumen	2 Dokumen	161,252,500.00	151,356,000	93.86	100.00
		Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	2 Materi	2 Materi	100,000,000.00	88,434,776	88.43	100.00
		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	36,578,750.00	30,329,726	82.92	100.00
		Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 kegiatan	1 kegiatan	36,578,750.00	30,329,726	82.92	100.00
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 Kegiatan	3 Kegiatan	273,285,500.00	253,606,126	92.80	96.69
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	215,030,500.00	211,954,440	98.57	100.00
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 kelompok	2 kelompok	38,255,000.00	32,825,686	85.81	100.00
		Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha	Jumlah kegiatan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha	2 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000.00	8,826,000	44.13	54.76
Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	145.481,98 Ton/Tahun	159.305,66 Ton/Tahun	7,722,533,987.00	7,493,819,904	97.04	100.00
	Meningkatnya Pendapatan Nelayan		Nilai Tukar Nelayan	112 NTN/NTBi	97,96 NTN/NTBi				
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2,661,921,500.00	2,579,074,047	96.89	100.00
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 data	4 data	50,000,000.00	35,468,000	70.94	100.00
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Prasarana	3 Prasarana	869,161,500.00	858,105,060	98.73	100.00
		Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	3 prasarana	3 prasarana	895,000,000.00	869,684,097	97.17	100.00
		Pengelolaan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Dokumen data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	3 data	3 data	165,425,500.00	158,728,762	95.95	100.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET & REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV		Fisik
							REALISASI	%	
		Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	3 sarana	3 sarana	93,207,500.00	86,418,528	92.72	100.00
		Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon/ Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	Jumlah kegiatan Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	3 kegiatan	3 kegiatan	58,714,500.00	56,885,000	96.88	100.00
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3 Sarana	3 Sarana	530,412,500.00	513,784,600	96.87	100.00
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	315,672,500.00	291,163,300	92.24	100.00
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	3 Data	3 Data	295,310,000.00	271,983,300	92.10	100.00
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3 Sarana	3 Sarana	20,362,500.00	19,180,000	94.19	100.00
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3 Kegiatan	3 Kegiatan	65,864,500.00	63,997,800	97.17	100.00
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3 dokumen	3 dokumen	65,864,500.00	63,997,800	97.17	100.00
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	35,690,000.00	32,867,200	92.09	100.00
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	3 bukti	3 bukti	35,690,000.00	32,867,200	92.09	100.00
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3 Lokasi	3 Lokasi	4,643,385,487.00	4,526,717,557	97.49	100.00
		Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah paket Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan	3 paket	3 paket	2,287,192,687.00	2,268,259,962	99.17	100.00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Sarana	3 Sarana	792,050,000.00	762,948,373	96.33	100.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET & REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV		Fisik
							REALISASI	%	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Pemerintahan	3 Pemerintahan	1,564,142,800.00	1,495,509,222	95.61	100.00
Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	152.405,21 Ton/Tahun	140.319,03 Ton/Tahun	3,532,806,716.00	3,426,576,763	96.99	100.00
	Meningkatnya Kebutuhan Benih		Jumlah Produksi Benih	76.390 ribu ekor	39.770 ribu ekor				
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 kegiatan	4 kegiatan	28,185,000.00	25,340,000	89.91	100.00
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah kegiatan dalam rangka Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	4 kegiatan	4 kegiatan	28,185,000.00	25,340,000	89.91	100.00
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Lokasi	4 Lokasi	1,394,334,800.00	1,369,506,780	98.22	100.00
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Prasarana	4 Prasarana	13,939,900.00	12,650,000	90.75	100.00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Sarana	4 Sarana	1,140,000,000.00	1,122,351,000	98.45	100.00
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya yang dibina	4 Pembudidaya	4 Pembudidaya	50,000,000.00	49,505,000	99.01	100.00
		Pengelola Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	4 kegiatan	77,974,000.00	74,645,000	95.73	100.00
		Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	112,420,900.00	110,355,780	98.16	100.00
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2 kegiatan	2 kegiatan	2,110,286,916.00	2,031,729,983	96.28	100.00
		Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 paket	4 paket	906,106,916.00	848,127,945	93.60	100.00
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 paket	4 paket	1,204,180,000.00	1,183,602,038	98.29	100.00
Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan dan UU yang berlaku	90.00%	90.00%	847,381,000.00	761,490,119	89.86	100.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET & REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV		Fisik
							REALISASI	%	
	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP		Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP	58 kelompok	68 kelompok				
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Lokasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	7 Lokasi	7 Lokasi	847,381,000.00	761,490,119	89.86	100.00
		Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di Wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah kegiatan Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan	91,930,000.00	70,065,038	76.22	100.00
		Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan	450,000,000.00	431,437,262	95.87	100.00
		Penanganan perkara sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah kegiatan Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1 kegiatan	1 kegiatan	42,500,000.00	41,080,688	96.66	100.00
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai Kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	5 Dokumen	16,512,000.00	16,512,000	100.00	100.00
		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	5 Dokumen	76,248,000.00	70,707,011	92.73	100.00
		Pengawasan Usaha Pemanfaatan daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan	63,611,000.00	52,863,120	83.10	100.00
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1 kegiatan	1 kegiatan	106,580,000.00	78,825,000	73.96	100.00
Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	3.50%	2.09%	975,987,000.00	894,521,043	91.65	98.11
Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.	Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan		Jumlah volume produk olahan hasil perikanan	35.697,36 ton/tahun	37.583,41 ton/tahun				
Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.	Meningkatnya Konsumsi Ikan		Angka Konsumsi Ikan	61,23 Kg/Kap/Tahun	75,00 Kg/Kap/Tahun				
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Lokasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	6 Lokasi	6 Lokasi	378,925,000.00	357,783,781	94.42	100.00
		Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk di konsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	6 Unit	6 Unit	211,845,000.00	200,152,001	94.48	100.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

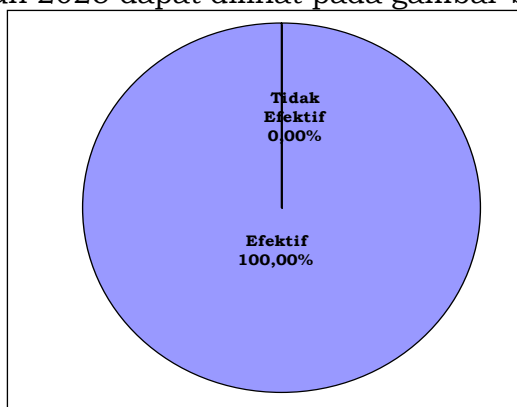
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET & REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV		Fisik
							REALISASI	%	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Strandar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	6 Unit	6 Unit	167,080,000.00	157,631,780	94.35	100.00
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	597,062,000.00	536,737,262	89.90	96.91
		Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	6 Dokumen	360,875,000.00	336,906,434	93.36	100.00
		Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	6 Unit	6 Unit	217,717,000.00	199,830,828	91.78	100.00
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Jumlah bahan baku	2 kegiatan	2 Kegiatan	18,470,000.00	-	-	-
						21,163,081,323.00	19,075,747,501	90.14	100.00
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				21,163,081,323.00	19,075,747,501	90.14	100.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				21,163,081,323.00	19,075,747,501	90.14	100.00
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Layanan BLUD	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	21,163,081,323.00	19,075,747,501	90.14	100.00

3.3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Demi terwujudnya masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pemberdayaan sumberdaya manusia, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalamnya maka strategi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan pada Strategi pembangunan dituangkan dalam 11 kebijakan yang dijabarkan ke dalam 6 Program Utama dan 17 Kegiatan Utama. Secara umum, kinerja dinas dinilai Sangat Baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang masuk kategori "Baik" atau "Cukup" karena adanya transisi metode perhitungan data (seperti pada indikator KIM dan PDRB).

Secara garis besar bahwa, tingkat efektivitas capaian outcome dari seluruh kegiatan pada tahun 2025 dinyatakan mencapai 100% (Sangat Efektif). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dirumuskan telah selaras dan berhasil mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra.

Gambaran tingkat efektifitas capaian outcome dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.5 Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2025

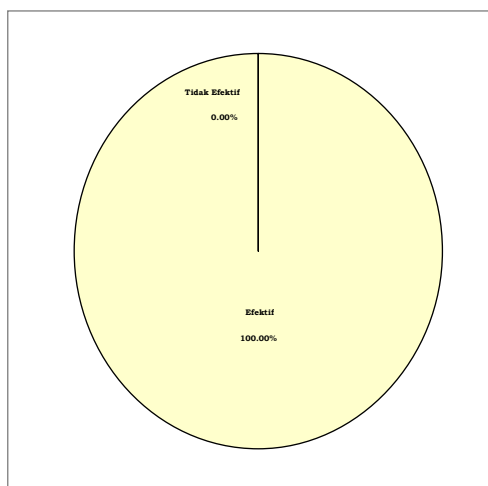
3.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran

Setiap kegiatan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam perumusan pencapaian indikator kinerja kegiatan harus diarahkan dan selaras dengan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang dapat dicapai pada tahun 2025 melalui program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan berhasil sebesar 100% dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Indikator keberhasilan tersebut diukur melalui indikator sasaran sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Setiap kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan memang dimaksudkan secara spesifik untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan menyatakan bahwa:

- a. Efektivitas 100%: Secara metodologi, pencapaian kinerja kegiatan dinilai berhasil 100% dalam mendukung sasaran yang ingin dicapai. Artinya, seluruh output dari program dan kegiatan yang dijalankan sudah selaras (in-line) dengan indikator sasaran.
- b. Aplikasi Program: Indikator keberhasilan diukur melalui kesesuaian aplikasi kegiatan yang seharusnya menunjang pencapaian sasaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan data hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan bahwa dari total kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja, semua kegiatan termasuk efektif dalam mewujudkan sasaran. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana pada gambar berikut ini.



Gambar 3.6 Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.24 Kegiatan Yang Secara Individual Tidak Efektif Namun Secara Bersama-sama Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Sasaran strategis yang kurang dapat diwujudkan
-	--	--

Tabel 3.25 Kegiatan Yang Tidak Efektif dan Tidak Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Sasaran Strategis yang Kurang Dapat Diwujudkan
-	--	--

Meskipun secara sistem dan pelaksanaan kegiatan dinilai efektif (100%), yang menjadi catatan kritis yaitu: apabila ditinjau dari pencapaian indikator sasaran Tahun 2025 masih belum sepenuhnya dapat tercapai.

Hal ini menunjukkan adanya celah (gap) antara pelaksanaan teknis dengan hasil akhir di lapangan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

- 1) Ketidakesesuaian Aplikasi: Ada indikasi bahwa meskipun kegiatan terlaksana secara fisik (100%), namun dampak atau daya dorong kegiatan tersebut belum cukup kuat untuk memenuhi angka target kuantitatif sasaran yang sangat tinggi.
- 2) Faktor Eksternal: Seperti pada sasaran Nilai Tukar Nelayan (NTN), meskipun kegiatan bantuan sarana sudah dilakukan, hasil akhirnya sangat dipengaruhi oleh harga pasar dan biaya konsumsi rumah tangga yang berada di luar kendali teknis dinas.
- 3) Transisi Data: Perubahan istilah dan metode hitung (seperti dari AKI menjadi KIM) menyebabkan angka realisasi terlihat jomplang dibandingkan target awal yang ditetapkan di awal tahun.

3.4 Analisis Dampak

Analisis dampak merupakan suatu analisis atau kajian mengenai dampak atau pengaruh penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Dengan mengetahui dampak dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan maka suatu kegiatan dapat ditentukan tingkat keberhasilan dan kegunaannya bagi masyarakat, terutama di Kalimantan Tengah.

Sasaran strategis yang direncanakan dan telah dilaksanakan pada tahun 2025 saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dampak yang bisa dirasakan antara lain sebagai berikut :

1. Optimasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Tujuan ini dapat tercapai seiring dengan tercapainya **Sasaran Strategis-1: Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**, **Sasaran Strategis-2: Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap**, dan **Sasaran Strategis-3: Meningkatnya Kebutuhan Benih**.

Peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan hasil dari adanya upaya melalui kegiatan yang pada tahun sebelumnya telah dilakukan. Sebagai contoh produksi perikanan tangkap, pada tahun 2024 telah dilakukan berbagai kegiatan berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan (alat

tangkap dan kapal/ perahu), baik yang sifatnya penambahan maupun mengganti sarana prasarana nelayan yang telah rusak, diharapkan sebagai salah satu indikator penentu terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap.

Pembangunan perikanan tangkap diarahkan kepada optimalisasi operasional 2 (dua) pelabuhan perikanan yang direkomendasikan untuk dikelola oleh pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai dan UPT. Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang. Optimalisasi pelabuhan perikanan yang ada ini diharapkan akan menjadikannya sebagai pusat kegiatan operasional nelayan, sehingga aktifitas pelayanan dan data perikanan tangkap dapat dilaksanakan melalui fungsi pelabuhan perikanan. Melalui pelabuhan perikanan, akses pemantauan perijinan perikanan tangkap dapat dilakukan. Dengan optimalnya pelabuhan perikanan ini maka kegiatan perikanan di wilayah pesisir dapat terpantau dan tercatat dengan baik sehingga dapat meningkatkan peran serta nelayan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dari sisi perikanan budidaya, terdapat upaya melalui bantuan Pengadaan Kolam Sistem Bioflok Lengkap (terpasang), Pengadaan Mesin Pakan Ikan Skala Mini, Pengadaan Pakan, Pengadaan Benih dan bantuan sarana perbenihan yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu pembudidaya untuk dapat meningkatkan produksinya dan memberikan keuntungan baik secara jumlah produksi maupun meningkatkan nilai jual sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pembudidaya.

Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap seharusnya dapat secara langsung meningkatkan produksi produk olahan, hal ini terjadi mengingat sumber bahan baku produk olahan ikan di Kalteng sebagian besar berasal dari hasil tangkapan perairan laut dan umum, yaitu Ikan Tenggiri, Udang, dan Ikan Pipih; dan hasil budidaya, yaitu Patin, Lele, dan Udang.

Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, unit budidaya, dan unit pengolahan memiliki dampak terhadap kualitas produksi perikanan terutama pada produksi perikanan budidaya dan pengolahan. Dengan meningkatnya unit perbenihan yang mendapatkan sertifikat CPIB maka kualitas benih yang digunakan untuk pembudidayaan ikan di Kalimantan Tengah dapat terjamin. Kualitas benih yang terjamin akan menghasilkan ikan budidaya yang bermutu baik. Ikan yang bermutu baik akan menghasilkan produk olahan yang bermutu baik. Apabila kualitas benih, kualitas ikan budidaya, dan kualitas produk olahan

menjadi baik maka akan meningkatkan daya jualnya dan meningkatkan pendapatan petani perikanan.

2. Peningkatan Kualitas Mutu Produk dan Nilai Tambah untuk Peningkatan Investasi dan Ekspor hasil Kelautan dan Perikanan

Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan pada **Sasaran Strategis-4: Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan** juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada **Sasaran Strategis-5: Tingkat Angka Konsumsi Ikan**. Tidak semua orang menyukai makan ikan segar sehingga salah satu strategi yang dilakukan dalam memasyarakatkan makan ikan adalah melalui diversifikasi produk olahan hasil perikanan. Proses pengolahan hasil perikanan mampu memberikan nilai tambah pada produk-produk perikanan hasil penangkapan maupun budidaya ikan.

Ikan yang bersifat *perishable food* atau makanan yang mudah mengalami pembusukan, melalui proses pengolahan yang sesuai dengan kelayakan pengolahan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Olahan hasil perikanan yang melalui proses penggaraman/pengeringan, fermentasi, penanganan segar, maupun dalam bentuk produk siap konsumsi seperti amplang, kerupuk ikan, stik ikan, maupun olahan lainnya lebih disukai oleh masyarakat dan meningkatkan AKI Kalimantan Tengah.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan terutama pengolah hasil perikanan agar produktif dan inovatif dalam menciptakan ragam produk olahan yang mampu bersaing dengan produk olahan dari daerah lain. Dan tentunya, Unit Pengolahan Ikan (UPI) terus diberikan motivasi dan dorongan agar memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) agar menghasilkan produk-produk olahan hasil perikanan yang bermutu.

Peningkatan produksi perikanan pada **Sasaran Strategis-1** dan **Sasaran Strategis-2** juga mempengaruhi rata-rata konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah pada **Sasaran Strategis-5**. Dengan meningkatnya produksi perikanan akan mengakibatkan meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata konsumsi ikan masyarakat menjadi sebesar 59,84 kg/kapita/tahun di Tahun 2024, yang mana selama 5 tahun terakhir selalu menunjukkan *trend* kenaikan. Dampak dari tingginya rata-rata konsumsi ikan masyarakat ini antara lain tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sangat tinggi, meningkatnya

kesadaran masyarakat akan nilai gizi yang terkandung dalam daging ikan untuk kesehatan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membeli ikan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga daging. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa program pemerintah untuk memasyarakatkan makan ikan melalui GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) berhasil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah.

3. Peningkatan Kontribusi Ekonomi (PDRB) dan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

Tujuan ini dapat tercapai terlihat dari capaian pada **Sasaran Strategis-6: Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB** dan **Sasaran Strategis-7: Meningkatnya Pendapatan Nelayan**. Capaian pada kedua sasaran straktegis ini menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Dengan semakin besarnya laju pertumbuhan PDRB di sektor perikanan maka diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha perikanan.

Dengan besarnya laju pertumbuhan PDRB sektor kelautan dan perikanan berdampak terhadap :

- a. Sumber daya manusia semakin memiliki kemampuan daya saing yang tinggi sehingga pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
- b. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 menggambarkan keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah.

4. Mengoptimalkan Pengelolaan, Rahabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Capaian **Sasaran Strategis-8: Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir** menunjukkan perkembangan pengelolaan wilayah ruang laut dan pesisir. Dengan meningkatnya kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan berdampak terhadap lingkungan antara lain :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan.

- b. Sumberdaya ikan dapat terlindungi dan dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.
- c. Menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan yang dikonservasi.
- d. Menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan konservasi Kalimantan Tengah.

Dampak dari **Sasaran Strategis-8** adalah wilayah pesisir yang rusak dapat dipulihkan kembali dengan melakukan penanaman mangrove. Manfaat penanaman mangrove ini antara lain :

- a. Mencegah intrusi air laut agar air tanah tidak menjadi payau sehingga dapat dikonsumsi.
- b. Mencegah erosi dan abrasi pantai.
- c. Sebagai pencegah dan penyaring alami dari penguraian limbah organik yang sampai ke wilayah pesisir.
- d. Sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti biawak, kura-kura, monyet, burung, ular, juga beberapa jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting dan siput.

5. Meningkatkan Upaya Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan dan keterlibatan masyarakat sangat baik pada **Sasaran Strategis-10: Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP** sehingga mendukung tercapainya **Sasaran Strategis-9: Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku**. Beberapa kegiatan yang dilakukan dengan pemberian bantuan kepada POKMASWAS maka berdampak antara lain :

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan illegal.
- b. Meningkatkan pemantauan terhadap perairan di Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Kalimantan Tengah.
- d. Sumberdaya kelautan dan perikanan dapat terjaga kelestariaannya.
- e. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan berkeadilan.

6. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif

Sistem Pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta layanan birokrasi yang inovatif dan responsif terhadap masyarakat merupakan langkah menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan tercapainya **Sasaran Strategis-11: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel** dan **Sasaran Strategis-12: Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat** memberikan dampak sebagai berikut:

- a. Transparansi tata kelola pemerintah meningkat seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- b. Tertibnya pelaporan sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.
- c. Adanya pengembangan inovasi digital baik berupa website, media sosial, maupun aplikasi *mobile* berbasis *android* untuk mempercepat arus informasi sektor kelautan dan perikanan.
- d. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru di bidang kelautan dan perikanan.
- e. Tersedianya layanan informasi baik secara *offline* maupun *online*.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 telah mempunyai 12 (dua belas) indikator kinerja yang tertuang di dalam 12 (dua belas) sasaran strategis yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan dan meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.

Secara administratif dan prosedural, setiap kegiatan sudah tepat sasaran. Namun, secara kualitas dampak, dinas mengakui perlunya peninjauan kembali agar aplikasi kegiatan di masa mendatang memiliki daya ungkit yang lebih besar terhadap pencapaian angka target yang ada dalam Renstra.

B. Realisasi Anggaran

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas selain diukur dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, juga diukur dari pengalokasian dan pemanfaatan anggarannya yang tepat sasaran. Dimana mestinya dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta mendukung pelaksanaan kegiatan/ program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan

Tengah maka telah dialokasikan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi sebesar Rp. 89.555.228.512,00 yang terdiri dari: APBD (Sumber Dana PAD + DAU) sebesar Rp. 80.530.228.512,00 dan APBD (Sumber Dana DAK) sebesar Rp. 9.025.000.000,00 untuk melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 19 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan. Alokasi tersebut berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/26/TAPD/2024 Tanggal 22 Juli 2024 hal Pagu Rancangan APBD TA. 2025 Sesuai KUPA dan PPAS. Namun, terjadi mengalami pengurangan perjalan dinas, paket meeting, rehab gedung kantor, makan minum rapat, dan oprasional kantor sebesar Rp.29.326.164.568,00 sehingga alokasi menjadi sebesar Rp. 60.229.063.944,00 yang terdiri dari: APBD (Sumber Dana PAD + DAU) sebesar Rp. 51.204.063.944,00 dan APBD (Sumber Dana DAK) sebesar Rp. 9.025.000.000,00. Alokasi tersebut berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/47/TAPD/2024 Tanggal 31 Desember 2024 hal Pagu Rancangan APBD TA. 2025 Sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Berdasarkan DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025 melalui APBD Pergeseran mendahului perubahan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 51.204.063.944,00 yang terdiri dari: APBD (Sumber Dana PAD + DAU) sebesar Rp. 51.204.063.944,00 dan APBD (Sumber Dana DAK) sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah). Terdapat rasionalisasi alokasi DAK tahun 2025 menjadi Rp Rp. 0 (Nol Rupiah). Alokasi tersebut berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/002/TAPD/2024 Tanggal 7 Februari 2025 hal Pagu Pergeseran APBD TA. 2025 Sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah. Namun, terjadi mengalami Rasionalisasi Perdin 50% sebesar Rp.2.699.770.900,50 dan Penundaan Anggaran Kegiatan sebesar Rp.12.506.858.600,00. Sehingga alokasi menjadi sebesar sebesar Rp.48.504.293.043,50 yang terdiri dari: APBD (Sumber Dana PAD + DAU) sebesar Rp.48.504.293.043,50 dan APBD (Sumber Dana DAK) sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah).

Berdasarkan DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025 melalui APBD Perubahan mendapatkan alokasi sebesar Rp.62.512.225.450,32 (Pagu Indikatif APBD Tahun Anggaran 2025). Alokasi

tersebut berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/029/TAPD/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 hal Pagu belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Rancangan Perubahan APBD TA. 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 050/ 029 / TAPD/2025
 Tanggal : 26 Agustus 2025

Pagu Belanja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Rancangan Perubahan APBD TA. 2025

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

PAGU INDIKATIF BELANJA KUPA PPAS P TA 2025	BELANJA PEGAWAI	DANA EARMARK		PAGU INDIKATIF APBD P TA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5=4-1)
66.326.039.864,00	15.737.083.721,30	BLUD	21.163.081.323,00	62.512.225.450,32	(3.813.814.414)
		DAK FISIK	,00		
		DAK NON FISIK	,00		
		DBH-DR	,00		
		DBH SAWIT	,00		
DBH-CHT	,00				

Pada akhir tahun anggaran 2025, realisasi keuangan sebesar Rp.37.735.055.391,- (91,26%). Secara rinci jumlah alokasi dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20 Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	BOBOT	CAPAIAN AKHIR TAHUN		
				KEUANGAN		FISIK
				RP	%	%
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.230.793.144,00	33.060.434.394,00	68,16	24.127.851.183,00	89,10	100,00
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.566.430.500,00	1.289.857.619,50	2,66	1.030.796.379,00	86,63	100,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	16.979.264.700,00	8.345.812.230,00	17,20	7.493.819.904,00	97,04	100,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.267.721.600,00	3.952.740.800,00	8,14	3.426.576.763,00	96,99	100,00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	2.830.834.000,00	879.461.000,00	1,82	761.490.119,00	89,86	100,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.354.020.000,00	975.987.000,00	2,02	894.521.043,00	91,65	100,00
TOTAL	60.229.063.944,00	48.504.293.043,50	100,00	37.735.055.391,00	91,87	100,00

Berikut adalah rincian output dari program diatas, yang dibagi berdasarkan jenis kegiatannya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini pada dasarnya adalah "dapur" operasional dari sebuah dinas atau badan. Output (keluarannya) tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, melainkan berfokus pada pemenuhan fasilitas dan administrasi internal agar pegawai bisa bekerja maksimal. Tujuan akhirnya (Outcome) adalah memastikan roda organisasi berjalan lancar, tertib administrasi, dan akuntabel, yang umumnya dibuktikan dengan pencapaian Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang baik.

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Berbeda dengan administrasi kantor, program ini berfokus pada tindakan nyata di lapangan (laut dan pesisir) dengan tujuan akhirnya (Outcome) adalah terjaganya kesehatan ekosistem laut dan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini berfokus pada produktivitas dan kesejahteraan nelayan di wilayah laut dengan tujuan akhirnya (Outcome) adalah meningkatnya pendapatan nelayan dan jumlah produksi perikanan tanpa merusak ekosistem laut.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya berfokus pada pengembangan produksi ikan melalui sistem budidaya (ternak ikan) di air tawar, payau, maupun laut. Tujuan akhirnya (Outcome) adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya secara mandiri dan menguatnya ketahanan pangan serta ekonomi masyarakat pembudidaya.

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan merupakan instrumen penegakan aturan untuk memastikan sumber daya laut tidak dirusak atau diambil secara ilegal. Output dari program ini berfokus pada kepatuhan, pengamanan, dan penindakan. Tujuan akhirnya (Outcome) adalah menurunnya tingkat pelanggaran di laut dan terjaganya kelestarian sumber daya kelautan serta perikanan dari praktik yang merusak (destructive fishing).

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

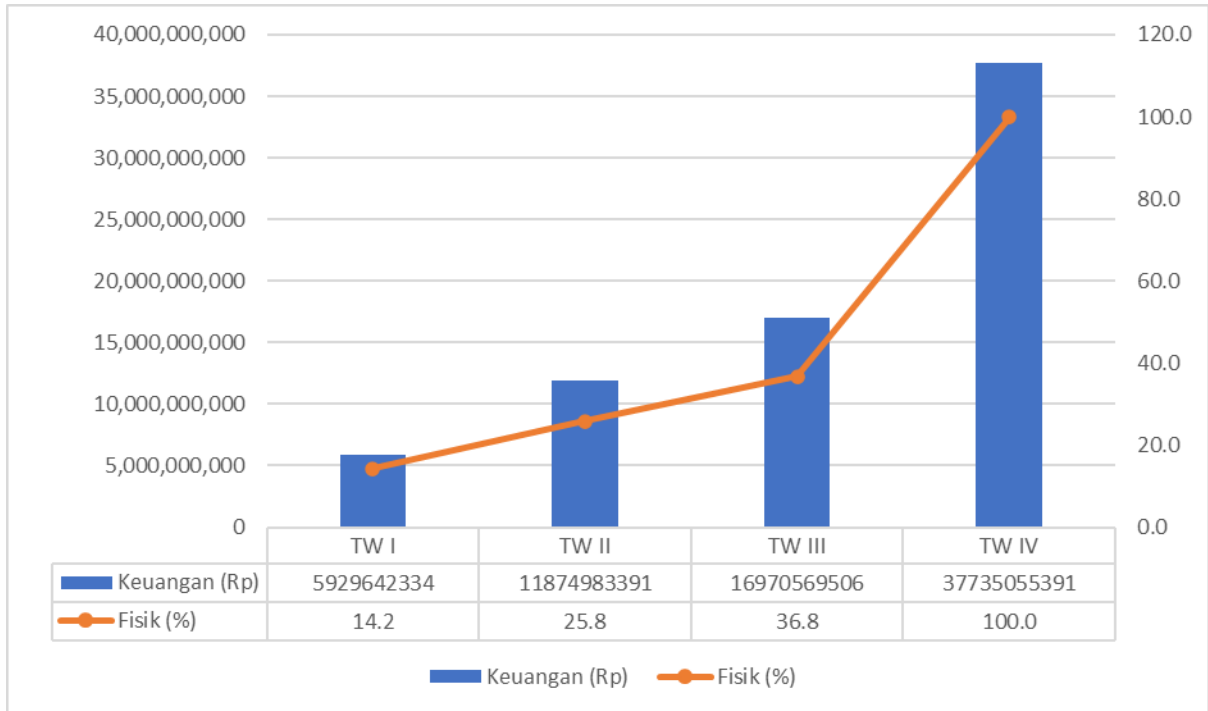
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan berfokus pada pemberian nilai tambah (hilirisasi) bagi produk perikanan agar memiliki daya saing tinggi dan jangkauan pasar yang lebih luas. Tujuan akhirnya (Outcome) adalah meningkatnya nilai jual produk perikanan, terserapnya hasil panen secara maksimal, dan meningkatnya pendapatan para pengolah serta pedagang ikan.

Perkembangan daya serap keuangan per triwulan untuk Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21 *Perkembangan Daya Serap Keuangan per triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA HASIL	TARGET		CAPAIAN		PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	CAPAIAN KEUANGAN PER TRIWULAN											
		VOLUME OUTPUT	SATUAN	VOLUME OUTPUT	SATUAN			REALISASI TW I		FISIK	REALISASI TW II		FISIK	REALISASI TW III		FISIK	REALISASI TW IV		FISIK
								KEUANGAN	%		KEUANGAN	%		KEUANGAN	%		KEUANGAN	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	B	Predikat	B	Predikat	33.230.793.144,00	33.060.434.394,00	5.213.751.648,00	15,69	13,72	9.626.488.309,00	29,12	29,69	13.724.631.069,00	41,51	45,69	24.127.851.183,00	89,10	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	34,24	Kg/Kapita/Tahun	35,69	Kg/Kapita/Tahun	1.354.020.000,00	975.987.000,00	55.610.000	4,11	5,00	143.613.540,00	14,71	16,17	208.904.001,00	21,40	23,85	894.521.043,00	91,65	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,50	Persen (%)	2,06	Persen (%)	1.566.430.500,00	1.289.857.619,50	35.655.000,00	2,28	2,84	95.175.840,00	7,38	9,09	126.052.006,00	9,77	51,09	1.030.796.379,00	86,63	100,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	90	Persen (%)	95,45	Persen (%)	2.830.834.000,00	879.461.000,00	22.160.000,00	0,78	0,87	82.086.020,00	9,33	14,26	160.788.620,00	18,28	18,20	761.490.199,00	89,86	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	145.481,98	Ton	159.305,74	Ton	16.979.264.700,00	8.345.812.230,00	152.460.441,00	0,90	1,44	633.690.857,00	7,59	11,20	1.271.200.153,00	15,23	28,86	7.493.819.904,00	97,04	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	152.405,21	Ton	140.319,03	Ton	4.267.721.600,00	3.952.740.800,00	450.005.245,00	10,54	11,89	1.293.928.8525,00	32,73	34,31	1.478.993.657,00	37,42	41,23	3.426.576.763,00	96,99	100,00

Perkembangan daya serap anggaran dan fisik pada tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 3.7 Grafik Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2025 Belanja Per Triwulan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan daya serap anggaran belanja Triwulan I sampai Triwulan III cukup stabil kenaikannya, sedangkan kenaikan pada Triwulan IV sangat drastis, dikarenakan sebagian besar realisasi keuangan yang mengikuti realisasi fisik pekerjaan, khususnya pekerjaan pengadaan barang/ jasa, terjadi pada Triwulan IV. Realisasi keuangan di akhir Tahun 2025 mencapai angka 100,00%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara formal merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Media pertanggungjawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian disamping LKIP sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam :

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
- b. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
- c. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;
- d. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil;
- e. Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang.

4.1 Capaian Kinerja IKU

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulanan selama tahun 2025, dengan mengacu pada RENSTRA PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Penetapan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah disepakati dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Penilaian ini dilakukan oleh tim dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

a. Capaian Kategori Terhadap Target PK Tahun 2025

Dari hasil penilaian terhadap 12 (dua belas) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 12 (dua

belas) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah baik terhadap target PK tahun 2025, dengan 6 (enam) indikator kategori Sangat Baik, 4 (empat) indikator dalam kategori Baik dan 2 (dua) indikator dalam kategori cukup.

Indikator kinerja dengan kategori SANGAT BAIK (biru) dicapai pada berikut ini :

- a. Sasaran : **Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap** dengan indikator *Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)* sebesar **109,50%**;
- b. Sasaran: **Meningkatnya Kebutuhan Benih** dengan indikator *Jumlah Kebutuhan Benih (Ribu Ekor)* sebesar **604,31%**;
- c. Sasaran : **Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir** dengan indikator *Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang laut dan Peisir (Lokasi)* sebesar **166,66%**;
- d. Sasaran : **Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku** dengan indikator *persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku (%)* sebesar **106,05%**;
- e. Sasaran : **Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP** dengan indikator *Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP (Kelompok)* sebesar **117,24%**; dan
- f. Sasaran : **Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat** dengan indikator *Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah)* sebesar **213,51%**.

Indikator kinerja dengan kategori BAIK (hijau) dicapai pada berikut ini:

- a. Sasaran : **Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)* dengan tingkat capaiannya sebesar **92,06%**;
- b. Sasaran : **Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan** dengan indikator *Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)* sebesar **99,99%**;
- c. Sasaran : **Meningkatnya Pendapatan Nelayan** dengan indikator *Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)* dengan capaian sebesar **87,50%**; dan
- d. Sasaran : **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel** dengan indikator *Nilai SAKIP (Predikat)* sebesar **100,00%**;

Indikator kinerja dengan kategori BAIK (hijau) dicapai pada berikut ini:

- a. Sasaran : **Meningkatnya Konsumsi Ikan** dengan indikator *Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)* sebesar **58,28%**; dan
- b. Sasaran : **Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB** dengan indikator *Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)* dengan capaian sebesar **58,85 %**.

b. Capaian Kategori Terhadap Target Pusat Tahun 2025

Dari hasil penilaian terhadap 12 (dua belas) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 12 (dua belas) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah baik terhadap target PK tahun 2025, dengan 8 (delapan) indikator kategori Sangat Baik dan 4 (empat) indikator dalam kategori Baik.

Indikator kinerja dengan kategori SANGAT BAIK (biru) dicapai pada berikut ini :

- g. Sasaran : **Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap** dengan indikator *Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)* sebesar **109,50%**;
- h. Sasaran: **Meningkatnya Kebutuhan Benih** dengan indikator *Jumlah Kebutuhan Benih (Ribu Ekor)* sebesar **604,31%**;
- i. Sasaran : **Meningkatnya Konsumsi Ikan** dengan indikator *Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)* sebesar **104,23%**;
- j. Sasaran : **Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB** dengan indikator *Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)* dengan capaian sebesar **103,00 %**;
- k. Sasaran : **Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir** dengan indikator *Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang laut dan Peisir (Lokasi)* sebesar **166,66%**;
- l. Sasaran : **Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku** dengan indikator *persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku (%)* sebesar **112,29%**;
- m. Sasaran : **Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP** dengan indikator *Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP (Kelompok)* sebesar **117,24%**; dan

- n. Sasaran : **Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat** dengan indikator *Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah)* sebesar **213,51%**.

Indikator kinerja dengan kategori BAIK (hijau) dicapai pada berikut ini:

- a. Sasaran : **Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)* dengan tingkat capaiannya sebesar **100,00%**;
- b. Sasaran : **Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan** dengan indikator *Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)* sebesar **99,99%**;
- c. Sasaran : **Meningkatnya Pendapatan Nelayan** dengan indikator *Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)* dengan capaian sebesar **96,09%**; dan
- d. Sasaran : **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel** dengan indikator *Nilai SAKIP (Predikat)* sebesar **100,00%**;

Data lengkap prestasi capaian kinerja 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 termasuk yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai berikut : (i) Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun); (ii) Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun); (iii) Jumlah Kebutuhan Benih (Ribuan Ekor); (iv) Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun); (v) Tingkat Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Kg/Kap/Tahun); (vi) Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%); (vii) Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi); (viii) Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi); (ix) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku (%); (x) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Berperan Dalam Kegiatan Pengawasan SDKP (Kelompok); (xi) Nilai SAKIP (Predikat); dan (xii) Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah).

Untuk penilaian kinerja keuangan terkait dukungan terhadap kegiatan strategis diukur melalui realisasi keuangan. Di tahun 2025 realisasi keuangan terhadap program/ kegiatan terkait kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp.37.735.055.391,00 (91,26%) dari pagu anggaran Rp.41.349.144.126,72.

4.2 Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja selama tahun 2024, yaitu meliputi :

- a. Lemahnya data perikanan karena proses pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan yang terintegrasi di pusat membuat data-data terkait produksi perikanan dan angka konsumsi ikan Kalimantan Tengah dapat diketahui angka tetapnya setelah melalui proses validasi per semester di tingkat pusat;
- b. Tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dimana kenaikan harga pakan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan konsumsi sehingga menyebabkan pembudidaya mengalami kerugian, akibatnya banyak pembudidaya yang mengurangi kegiatan usahanya;
- c. Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan;
- d. Terjadinya perubahan musim yang ekstrim sehingga mengakibatkan produksi budidaya ikan menjadi menurun karena banyak benih ikan yang mengalami kematian;
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- f. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
- g. Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan;
- h. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan;
- i. Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- j. Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional;
- l. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat; dan
- m. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

- n. Adanya peralihan dari AKI menuju KIM yang menyebabkan perbedaan nilai yang diakibatkan perbedaan indeks komponen perhitungan.

4.3 Upaya Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- 1) Sejak 2017, fokus perikanan tangkap adalah rehabilitasi/ pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan, yaitu dengan dimulainya Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedepannya, penyelesaian Rehabilitasi/ Pembangunan Lanjutan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai akan terus dikerjakan sampai dengan 2024, sambil tetap menyiapkan kelengkapan dokumen pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan lainnya;
- 2) Mendorong percepatan operasional unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- 3) Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba;
- 4) Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya;
- 5) Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR;
- 6) Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah;
- 7) Karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga, sehingga diperlukan sebuah koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral);
- 8) Memperkuat payung hukum pengelolaan wilayah perairan (Perda dan sosialisasi Perda);
- 9) Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat;
- 10) Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada; dan
- 11) Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah.

12) Penerapan istilah KIM pada Tahun 2026 sehingga penilaian dapat akurat.

Dengan demikian diharapkan Laporan Kinerja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya karena hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari LKIP. Tentunya harapan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya secara berkelanjutan dapat tercapai dalam mewujudkan Kalimantan Tengah Semakin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis).

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112,
Telepon (0536) 3229663, Laman www.dislutkan.kalteng.go.id, Pos-el dislutkan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**

Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112,
Telepon (0536) 3229663, Laman www.dislutkan.kalteng.go.id, Pos-el dislutkan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	152.405,21
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	145.481,98
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih	Ribu Ekor	76.390
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton/Tahun	35.697,36
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	61,23
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	3,50
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	NTN/NTBi	112,00
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Lokasi	6
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	%	90
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP	Kelompok	58
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Predikat	B
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID	Naskah	37

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp. 1.566.430.500	
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 16.979.264.700	
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 4.267.721.600	
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 2.830.834.000	
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.354.020.000	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 33.230.793.144	

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112,
Telepon (0536) 3229663, Laman www.dislutkan.kalteng.go.id, Pos-el dislutkan@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**

Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112,
Telepon (0536) 3229663, Laman www.dislutkan.kalteng.go.id, Pos-el dislutkan@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi:

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT);
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh gubernur.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Jumlah produksi perikanan budidaya yang terealisasi dibagi target produksi perikanan budidaya dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Jumlah produksi perikanan tangkap yang terealisasi dibagi target produksi perikanan tangkap dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (Ribu Ekor)	Jumlah kebutuhan benih yang terealisasi dibagi target jumlah kebutuhan benih dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	Jumlah volume produk olahan hasil perikanan yang terealisasi dibagi target jumlah volume produk olahan hasil perikanan dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	AKI yang terealisasi dibagi target AKI dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB yang terealisasi dibagi target kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	Nilai Tukar Nelayan yang terealisasi dibagi dengan target Nilai Tukar Nelayan dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	Jumlah lokasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir yang terealisasi dibagi dengan target jumlah lokasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku (%)	Realisasi persentase capaian dibagi target persentase capaian dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan dalam pengawasan SDKP (Kelompok)	Realisasi jumlah POKMASWAS dibagi target jumlah POKMASWAS dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	Realisasi nilai SAKIP dibagi target nilai SAKIP dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (naskah)	Realisasi Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID dibagi target Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email: dislutkan@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, 24 Januari 2025

Kepala Dinas,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email: dislutkan@kalteng.go.id

A. Target Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket.
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	152.405,21	30.481,04	76.202,61	60.962,08	152.405,21	
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	145.481,98	29.096,40	72.740,99	58.192,79	145.481,98	
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih	Ribu Ekor	76.390	15.278,00	38.195,00	30.556,00	76.390,00	
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton/Tahun	35.697,36	7.139,47	17.848,68	14.278,94	35.697,36	
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	61,23	12,25	30,62	24,49	61,23	
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	1	0,20	0,50	0,40	1,00	
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	NTN/NTBi	112	100,00	100,00	100,00	112,00	
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Lokasi	6	1,00	3,00	3,00	6,00	
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	%	90	85,00	85,00	85,00	90,00	
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP	Kelompok	58	12,00	29,00	23,00	58,00	
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID	Naskah	37	8,00	20,00	27,00	37,00	

B. Target Realisasi Keuangan

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket.
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.069.273.000	213.854.600	534.636.500	908.882.050	1.069.273.000	
		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	67.157.500	13.431.500	33.578.750	57.083.875	67.157.500	
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	430.000.000	86.000.000	215.000.000	365.500.000	430.000.000	
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2.443.734.500	488.746.900	1.221.867.250	2.077.174.325	2.443.734.500	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	190.725.000	38.145.000	95.362.500	162.116.250	190.725.000	
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125.000.000	25.000.000	62.500.000	106.250.000	125.000.000	
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65.810.000	13.162.000	32.905.000	55.938.500	65.810.000	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6.718.995.200	1.343.799.040	3.359.497.600	5.711.145.920	6.718.995.200	
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000	10.000.000	25.000.000	42.500.000	50.000.000	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.502.721.600	300.544.320	751.360.800	1.277.313.360	1.502.721.600	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.715.000.000	543.000.000	1.357.500.000	2.307.750.000	2.715.000.000	
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.240.834.000	248.166.800	620.417.000	1.054.708.900	1.240.834.000	
5.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	617.080.000	123.416.000	308.540.000	524.518.000	617.080.000	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	736.940.000	147.388.000	368.470.000	626.399.000	736.940.000	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.866.800.000	373.360.000	933.400.000	1.586.780.000	1.866.800.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.072.244.394	3.814.448.879	9.536.122.197	16.211.407.735	19.072.244.394	

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket.
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	243.500.000	48.700.000	121.750.000	206.975.000	243.500.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.075.000	116.215.000	290.537.500	493.913.750	581.075.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.453.817.743	890.763.549	2.226.908.872	3.785.745.082	4.453.817.743	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.007.500.000	201.500.000	503.750.000	856.375.000	1.007.500.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.574.700.000	514.940.000	1.287.350.000	2.188.495.000	2.574.700.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.431.156.007	686.231.201	1.715.578.004	2.916.482.606	3.431.156.007	
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	21.163.081.323	4.232.616.265	10.581.540.662	17.988.619.125	21.163.081.323	

Palangka Raya, 24 Januari 2025

Kepala Dinas,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 3229663, Laman www.dislutkan.kalteng.go.id, Pos-el dislutkan@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	160.537,50
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	149.486,44
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih	Ribu Ekor	78.580
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton/Tahun	36.009,20
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	63,04
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	3,60
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	NTN/NTBi	113,25
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Lokasi	7
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	%	90
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP	Kelompok	60

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Predikat	B
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID	Naskah	40

Kepala Dinas,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
	Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 196607271993031011





LAPORAN KINERJA 2025



KALTENG BERAKHLAK SUKA IKAN

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya - Kaimantan Tengah 73112



Telp. (0536) 3220517/ 3229663



Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id

